



Buletin Ketenagalistrikan

Edisi 44 Volume 11 Desember 2015

Sistem Pendukung Program 35.000 MW Disiapkan



**Listrik untuk Apartemen
Kini Ada Payung Hukumnya**

**Peluang Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
Semakin Terbuka**

**Mulai Januari 2016, Sertifikat Usaha Jasa Penunjang
Dilakukan Secara Online**

**Insentif Sektor Ketenagalistrikan
Dalam Paket Kebijakan Ekonomi III**

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

mendukung Zona Integritas

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

serta

Wilayah Bebas dari Korupsi



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044
www.djk.esdm.go.id



Buletin Ketenagalistrikan

Edisi 44 Volume XIV|

DESEMBER 2015

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

Redaktur

Totoh Abdul Fatah
Wiwid Mulyadi
Heru Setiawan
Ear Marison
Hagni Surendro
Sudarti
Jackson Frans
Fathorrahman
Hari Dwi Wijayanto
Pandu Satria Jati B
Anggita Miftah Hairani
David F Silalahi
Ahmad Amiruddin
Novan Akhiryanto
Dina Andriani
Hening Surya Bayu A.
Fanny Ristantono
M. Tomas Triananta

Penyunting/ Editor

Ernawaty
Suwarno
Matilda Prameswari
Stefanus Wisnu W

Desain Grafis/Fotografer

Achmad Yusuf Haryono
Agus Supriyadi
Ajat Munajat
Novi Pravitasari
Adar

Sekretariat

Emi Tursilah
Irman Suryana
Anida Sabilawati
Rizka Octiwi
Riono Saputra

Alamat Redaksi

Redaksi Buletin Ketenagalistrikan
Jalan HR Rasuna Said Blok X2,
Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950

www.djk.esdm.go.id

Dari Redaksi

Pembaca yang budiman,

Menjelang akhir tahun 2015 ini, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 31 tahun 2015 tentang Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas. Dengan terbitnya peraturan ini, pemilik dan pengguna rumah susun dan apartemen saat ini tidak perlu bingung dengan aturan pembayaran listrik untuk bangunan terbatas yang ditinggalinya. Aturan baru ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk memperjelas aturan pembayaran listrik untuk kawasan terbatas. Topik mengenai hal tersebut diulas dalam Tajuk Utama Buletin Ketenagalistrikan pada edisi Desember ini.

Sementara itu, dalam Liputan Khusus dibahas mengenai peringatan Hari Listrik Nasional ke-70 yang diperingati setiap tanggal 27 Oktober 2015. Rangkaian peringatan ini diawali dengan *fun walk*, kemudian dilanjutkan dengan seminar, *coffee morning*, untuk kemudian ditutup dengan pameran.

Topik lain yang dibahas dalam buletin edisi kali ini antara lain pemanfaatan limbah PLTU Batubara untuk pembangunan infrastruktur, peluang usaha penunjang ketenagalistrikan yang semakin terbuka, serta PLN yang diminta untuk fokus pada distribusi dan transmisi listrik. Salah satu kegiatan internal di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang menjadi perhatian edisi kali ini adalah kegiatan *outing* di Puncak yang mendekatkan jalinan kebersamaan antar pegawai. Ini semua terekam dalam rubrik Galeri. Selain itu, sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi juga diliput untuk edisi ini. Selamat membaca!

Salam Redaksi

DAFTAR ISI

10 Peringatan Hari Listrik Nasional ke-70



Dari Redaksi

Tajuk Utama

- 6 Listrik Untuk Apartemen Kini Ada Payung Hukumnya

Liputan Khusus

Hari Listrik Nasional ke-70

- 8 Fun Walk Pembuka Rangkaian Hari Listrik Nasional Ke-70
10 Upacara Peringatan Hari Listrik Nasional ke-70
12 Aksi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana PLN
13 Tantangan PLN di Hari Listrik Nasional
14 Skema Investasi dan Harga Menarik untuk Pembangkit EBT
16 Sistem Pendukung Program 35.000 MW Disiapkan
18 Peran MKI Perlu Terus Ditingkatkan

Warta Kita

- 22 Karya Anak Negeri Harus Diapresiasi
23 Pengelolaan Energi Butuh Partisipasi Rakyat
24 Pameran Kelistrikan Indonesian 2015
25 Stakeholder Ketenagalistrikan Harus Duduk Satu Meja dan Satu Visi
27 Kementerian ESDM Berpartisipasi Dalam IIICE 2015
28 PLN Diharapkan Fokus pada Distribusi dan Transmisi Listrik
29 Peluang Usaha Penunjang Ketenagalistrikan Semakin Terbuka
30 Program Lisdes dan Instalasi Listrik Gratis Efektif Percepat Angka RE
31 Mulai Januari 2016, Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Dilakukan Secara Online
32 Proses Perizinan Ketenagalistrikan Diharapkan Dapat Lebih Ringkas

- 35 Komunikasi *Stakeholder* Ketenagalistrikan Perlu Terus Dijaga
- 36 Ditjen Ketenagalistrikan Selenggarakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi
- 43 Insentif Sektor Ketenagalistrikan Dalam Paket Kebijakan Ekonomi III

Resensi Buku

- 33 *Change Management* dalam Reformasi Birokrasi

Galeri

- 38 *Outing* Pererat Jalinan Kebersamaan

Pojok Peraturan

- 42 Daftar Legislasi & Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK Bulan Januari - November 2015

Tips

- 46 Cara Jitu Mengatur Anggaran Rumah Tangga

Inspirasi

- 48 *Study Visit* ke Perpustakaan di Malaysia

Kolom

- 51 Peran Perpustakaan dalam Repositori Institusi

Infografis

- 55 Satu Tahun Capaian Kementerian ESDM



12

Aksi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana PLN



20

Strategi Pemerintah untuk Dorong Program 35.000 MW



38

Outing Pererat Jalinan Kebersamaan



44

Limbah PLTU Batubara dapat Dimanfaatkan untuk Pembangunan Infrastruktur



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman membuka acara coffee morning pada Jumat (13/11) di Jakarta

Listrik untuk Apartemen Kini Ada Payung Hukumnya

Pemilik dan pengguna rumah susun dan apartemen saat ini tidak perlu bingung dengan aturan pembayaran listrik untuk bangunan terbatas yang ditinggalinya. Permasalahan penyediaan listrik di rumah susun saat ini telah memiliki payung hukum yaitu Peraturan Menteri ESDM nomor 31 tahun 2015 tentang Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman dalam pembukaan *coffee morning* sosialisasi peraturan terbaru sektor ketenagalistrikan, Jumat (13/11) menyampaikan bahwa aturan baru ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk memperjelas aturan pembayaran listrik untuk kawasan terbatas.

Coffee Morning yang diselenggarakan Ditjen Ketenagalistrikan menghadirkan beberapa asosiasi dan pemilik apartemen atau rumah susun sebagai peserta. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra berkesempatan menyampaikan sosialisasi aturan tersebut.

Menurut Satya, penyediaan tenaga listrik pada kawasan terbatas dapat dilakukan dengan tiga skema, yaitu sambungan langsung dari PLN ke masing-masing satuan bangunan, sambungan melalui Pengelola sebagai Usaha Penjualan, serta sambungan melalui kerja sama pengelola dengan PLN. Skema sambungan melalui kerja sama pengelola dengan PLN inilah yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 31

Tahun 2015. Menurut Satya, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penyaluran tenaga listrik di kawasan terbatas seperti apartemen, rusun dan strata title lainnya, umumnya tidak bersifat bisnis atau usaha, sehingga perlu pengaturan khusus agar tidak terjadi perselisihan atau dispute di masyarakat dan pemangku kepentingan.

“Dalam hal pengelola meneruskan seluruh biaya terkait dengan penyaluran listrik kepada tenant termasuk listrik untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang digunakan bersama tanpa diperoleh margin keuntungan, maka pengelola dikategorikan tidak menjual listrik” ungkap Satya.

Namun menurut Permen ESDM tersebut

Tajuk Utama

jika pengelola meneruskan seluruh biaya terkait dengan penyaluran listrik kepada *tenant* termasuk listrik untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang digunakan bersama dengan tambahan margin keuntungan tertentu, maka pengelola dikategorikan menjual listrik.

“Dan karenanya harus memiliki penetapan wilayah usaha dari BKPM dan memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik dari Gubernur” tegas Satya.

Dalam Permen ESDM 31/2015 ini, pemilik atau penghuni berhak mendapatkan informasi atas biaya pemanfaatan tenaga listrik yang dibayar kepada PLN dan data total pemakaian tenaga listrik pada benda bersama dan bagian bersama. Selain itu Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola wajib menyampaikan informasi kepada pemilik atau penghuni Satuan Bangunan setiap bulan sesuai permintaan.

Menurut Jarman, *coffee morning* ini dilakukan untuk menerima masukan dari peserta. Masukan dan usulan bisa disampaikan melalui diskusi atau secara tertulis kepada Ditjen Ketenagalistrikan.

Menurutnya pemerintah juga mengharapkan masukan dari masyarakat baik pemilik apartemen maupun pengelola untuk menyempurnakan aturan ini. “Mudah-mudahan aturan ini bisa memberi kepastian sehingga tidak lagi terjadi masalah,” ungkap Jarman. Menurutnya hal yang penting adalah prinsip keterbukaan. Ia mengapresiasi masukan dari peserta mengenai perlunya pihak ketiga yang mengaudit pelaporan pengelola rusun atau apartemen setiap bulannya. (PSJ)



Atas - Direktur Satya Zulfanitra menjelaskan pokok-pokok Permen 31/2015

Tengah - Peserta merupakan stakeholder yang terkait dengan topik mengenai listrik untuk apartemen, termasuk developer apartemen

Bawah - Sesi tanya jawab dilakukan sesuai paparan



Sesditjen Ketenagalistrikan Sujatmiko mengibarkan bendera start untuk memulai fun walk

Fun Walk Pembuka Rangkaian Hari Listrik Nasional Ke-70

Hari masih sangat pagi, matahari belum sepenuhnya terbit dari pucuk timur. Namun ratusan orang sudah mendatangi halaman kantor pusat PT PLN (Persero) di kawasan Trunojoyo Jakarta, Minggu (25/10). Keceriaan jelas terlihat dari orang-orang yang berpakaian putih merah dan bertopi ini. Bersama keluarga dan sahabat, mereka mendatangi tempat registrasi dan siap mengikuti Fun Walk Hari Listrik Nasional (HLN) ke-70.

Banyak diantara mereka membawa tongsis untuk berfoto *selfie*. Semakin siang, jumlah mereka semakin bertambah dan kepadatan orang-orang tak terhindarkan. Untungnya panitia yang terdiri dari PT PLN (Persero) dan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) sigap mengatur kerumunan orang.

Tepat pukul setengah tujuh pagi, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Sujatmiko mengibarkan bendera *start* yang diiringi dengan pelepasan balon bertuliskan angka 70. Setelah bendera start berkibar, para peserta yang terdiri dari karyawan keluarga besar PT PLN, MKI dan Kementerian ESDM memulai berjalan kaki yang mengambil rute jalan layang non tol Blok M- Antasari dan berputar di daerah kemang.

Fun walk ini adalah pembukaan rangkaian acara HLN ke-70. Ketua Umum MKI Iwan Supangkat dalam sambutannya selepas jalan santai menyampaikan bahwa rangkaian HLN ke-70 masih akan dilanjutkan dengan upacara dan *coffee morning* pada tanggal 27 Oktober 2015 dan ditutup dengan pameran dan seminar tanggal 3 – 5 November 2015.



Iwan sangat senang karena dengan jalan santai ini semua *stakeholder* dapat berkumpul dan bergembira bersama. Ia mengapresiasi kinerja dari panitia dan menyampaikan terima kasih atas dukungan PLN dan Ditjen Ketenagalistrikan. Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah Nasri Sebayang dalam sambutannya menyampaikan bahwa sektor ketenagalistrikan mendapat tantangan yang tidak mudah yaitu menyelesaikan program 35.000 MW dalam waktu lima tahun. Hal ini menurutnya membutuhkan semangat dan energi seluruh bangsa Indonesia. Ia menyampaikan bahwa tahun ini minimal 12.000 MW akan tandatangan kontrak dan 3.000 – 4.000 MW kapasitas listrik akan masuk ke sistem.

“Mari sama-sama ita menyatukan pendapat, dan energi,” ajaknya. Menurutnya momentum 70 tahun listrik Indonesia dikelola oleh perusahaan nasional harus mampu membangkitkan semangat karyawan PLN dan semua pihak untuk mensukseskan program 35.000 MW. Jalan santai ditutup dengan menikmati hiburan yang dipandu oleh Ronal dan Tike sebagai MC. Sambil menunggu pembagian *doorprize*, Chaplin Band tampil dan membangkitkan gelak tawa peserta. Meski berlangsung hingga siang hari, sebagian besar peserta masih bertahan dan menikmati hiburan. Selain itu dalam area *fun walk* juga dilaksanakan lomba menggambar untuk anak-anak, bazar dan *photo booth*. (PSJ)

Upacara Peringatan Hari Listrik Nasional ke-70

Tanggal 27 Oktober diperingati sebagai Hari Listrik Nasional. Ditjen Ketenagalistrikan bersama dengan PT PLN (persero) dan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) menggelar upacara peringatan Hari Listrik Nasional ke-70 di Plaza PLN Pusat, Jakarta pagi ini (27/10). Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan Ronggo Kuncahyo selaku Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan menjadi pembina upacara.

Mengawali sambutan, Ronggo menyampaikan bahwa Hari Listrik Nasional bukanlah milik salah satu instansi saja, namun juga milik seluruh stakeholder dan masyarakat Indonesia. Ronggo kembali mengingatkan bahwa Program 35.000 MW yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada awal Mei 2015 merupakan suatu upaya untuk mempercepat dan mendorong pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia.

"Program 35.000 MW bukanlah proyek ambisius. Ini adalah hutang

pada masyarakat yang mengalami defisit listrik," ujar Ronggo mengutip pernyataan Presiden.

Program ini juga memiliki *multiplier effect* yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, yakni penyerapan tenaga kerja secara langsung sebanyak 600.000 orang dan tiga juta tenaga kerja secara tidak langsung. Oleh karena itu, Ronggo mengharapkan dukungan dari para *stakeholder* dan masyarakat untuk menyukseskan Program 35.000 MW.

Terlebih lagi, Ronggo menambahkan, akhir tahun ini Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sudah akan mulai diberlakukan.

"Untuk menghadapi MEA, sektor ketenagalistrikan kita harus dapat bersaing dengan negara-negara lain di kawasan Asean," ujar Ronggo.

Meskipun rasio elektrifikasi Indonesia meningkat pesat dari 67.12% di tahun 2010 menjadi 86.36% di tahun 2015, ini masih tertinggal dibanding negara-

negara tetangga seperti Singapura (100%), Brunei Darussalam (99.7%), dan Thailand (99.3%). Ronggo menutup sambutannya dengan menyampaikan bahwa target pemerintah untuk mencapai rasio elektrifikasi 97.4% pada akhir 2019 menjadi tantangan kita bersama.

Peringatan Hari Listrik Nasional ke-70 dimeriahkan dengan penampilan *marching band*, paduan suara, dan simulasi dari Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana PLN. Ada pula pemotongan tumpeng oleh Ronggo Kuncahyo untuk kemudian diberikan kepada Dirut PLN Sofyan Basir. Rangkaian acara peringatan Hari Listrik Nasional ke-70 diawali pada Minggu (25/10) dengan acara jalan santai.

Hari ini, setelah upacara ada acara *coffee morning* yang mengambil tema "Kendala dan Solusi Jangka Pendek Bagi Pengembang Energi Terbarukan". Pameran listrik nasional di BSD akan menutup rangkaian peringatan Hari Listrik Nasional ini. (AMH)



Pegawai DJK ikut mengikuti upacara HLN ke-70 di Plaza PLN Pusat, Jakarta



Pemotongan tumpeng oleh Ronggo Kuncahyo



Tim Paduan Suara ikut meramaikan upacara dengan membawakan lagu-lagu daerah



Ronggo Kuncahyo menyampaikan sambutan selaku pembina upacara



Pembacaan doa dipimpin oleh Kabag Rencana dan Laporan DJK Totoh Abdul Fatah



Sesditjen Ketenagalistrikan Sujatmiko dan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul ikut menghadiri upacara HLN ke-70

AKSI TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA PLN DALAM PERINGATAN HARI LISTRIK NASIONAL KE-70

Seusai upacara peringatan Hari Listrik Nasional ke-70 bertempat di Plaza PLN Pusat, Jakarta (27/10), Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana PLN menunjukkan aksinya. Tim melakukan simulasi penyelamatan kebakaran dari lantai puncak di Gedung PLN Pusat. Simulasi dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai peran dan fungsi tim saat terjadi bencana kebakaran. (AMH)



Tantangan PLN di Hari Listrik Nasional

PT PLN (persero) diberikan tugas besar sehubungan dengan Program 42.000 MW (Program 35.000 MW ditambah dengan 7000 MW dari sisa *fast track* pertama) yang dilaksanakan dalam waktu lima tahun ke depan. Tapi dengan dukungan semua pihak, tugas ini akan dijadikan tantangan. Demikian disampaikan Dirut PLN Sofyan Basir dalam sambutannya pada acara *coffee morning* di Kantor Pusat PLN di Jakarta (27/10). *Coffee morning* ini merupakan salah satu acara dalam rangkaian peringatan Hari Listrik Nasional ke-70 yang dihadiri oleh komisaris PLN, Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), pimpinan perusahaan dan *stakeholder* lainnya.

"Meskipun banyak diskusi, dan bahkan sempat memunculkan polemik tapi kami sebagai perusahaan yang ditugasi akan serius; berpegang tangan erat satu sama lain, baik internal maupun dengan pihak lain.

Mudah-mudahan menjadi lebih ringan tugas kami," ujar Sofyan.

Dari total 42.000 MW, 4500 MW di antaranya berasal dari energi terbarukan, yakni geothermal (1300 MW), hidro (1700 MW), mikrohidro (700 MW), dan energi terbarukan lainnya hingga 800 MW.

"Kami tahu kendala dan resikonya terutama untuk geothermal. PLN mendorong supaya kendala tersebut dapat diatasi. Pengembangan energi terbarukan diharapkan lebih serius, terlebih kita punya *geothermal* yang

potensinya besar. Masalah harga dan investasi yang cukup besar menjadi hal lain yang juga perlu kita diskusikan. Kami tidak menutup mata, pengusaha dan pemerintah diharapkan bisa sama-sama memahami potensi dan resiko yang ada dalam bisnis ini," ungkap Sofyan.

Sofyan kemudian menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh



Dirut PLN Sofyan Basir menyampaikan tantangan yang dihadapi PLN

PLN. Ia mencontohkan pemadaman di beberapa tempat di Jabodetabek dalam kurun waktu 3-4 bulan ke terakhir diakibatkan oleh usia gardu dan trafo yang sudah lanjut. Kabel bawah tanah yang tua juga harus segera dirapikan. Ini butuh perbaikan menyeluruh dalam waktu 1-2 tahun ke depan.

Pembebasan lahan dan perijinan yang tidak tuntas dalam kurun 5-10 tahun ke belakang menjadi permasalahan tersendiri. Sofyan mengatakan telah berdiskusi dengan pemerintah supaya mengeluarkan regulasi agar masalah ini dapat ditangani lebih cepat dan

lebih mudah dengan kekuatan hukum yang jelas.

Sebelumnya, Sofyan menyampaikan PLN tengah berupaya meningkatkan kualitas dengan mengurangi pemadaman, meningkatkan pelayanan, dan mempercepat permintaan sambungan listrik. Ia menyampaikan hal tersebut selepas upacara Hari Listrik Nasional ke-70 di Plaza PLN Pusat sebelum *coffee morning*. Sofyan juga sempat membahas masalah subsidi listrik untuk masyarakat tidak mampu.

"Masyarakat miskin tetap diberikan subsidi. Kalau seseorang komplain bahwa dirinya miskin namun tidak mendapat subsidi, ia dapat mengajukan kartu miskin. Kartu miskin adalah kriteria dari pemerintah untuk mendapat subsidi listrik," terang Sofyan.

Sofyan menyatakan pihaknya ingin permasalahan subsidi ditertibkan agar elektrifikasi meningkat dan pelayanan meningkat. Tanggal 1 Januari 2016, pengaturan mengenai subsidi yang baru akan dicanangkan namun pelaksanaannya bertahap.

"Kalau tidak punya kartu miskin, tidak dapat subsidi. Ini adalah untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Jangan minta subsidi kalau tidak layak dapat subsidi" tegas Sofyan. (AMH)

Skema Investasi dan Harga Menarik untuk Pembangkit EBT

Pemerintah terus mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT). Disamping untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik, pengembangan EBT juga terus dilakukan dalam rangka menurunkan tingkat emisi CO2 dengan memberikan skema investasi yang menarik dan harga jual tenaga listrik yang lebih kompetitif. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian Dirjen Ketenagalistrikan Ronggo Kuncahyo saat menyampaikan sambutan Dirjen Ketenagalistrikan pada *coffee morning* Hari Listrik Nasional (HLN) ke-70 yang dilaksanakan setelah upacara peringatan HLN ke-70, Selasa (27/10).

Menurut Ronggo Saat ini komposisi pembangkit listrik dari air, panas bumi, dan energi terbarukan lain, baru mencapai 11 persen dari total pembangkit yang ada di Indonesia. Komposisi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) hingga akhir tahun 2014 ini sebesar 1.405 MW, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 5.059 MW, pembangkit listrik berbasis bioenergi, tenaga surya, angin, arus laut, dan lain-lain sebesar 216 MW. Ronggo menambahkan bahwa dalam pertemuan G20 di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan

emisi gas rumah kaca sebesar 26% dari level "business as usual" pada tahun 2020. "Atau 41% bila ada bantuan dari negara-negara maju," ungkapnya.

Selain memenuhi target *energy mix*, pembangunan listrik berbasis EBT juga akan memberi ruang bagi badan usaha ketenagalistrikan berskala kecil dan menengah untuk berpartisipasi lebih luas. Hal ini telah didukung dengan perbaikan *feed in tariff* yang progresif. Menurutnya pemerintah akan terus menyiapkan regulasi mengenai *feed in tariff* pembangkit listrik berbasis EBT yang dapat menarik investor untuk berinvestasi di sektor pembangkit listrik EBT di Indonesia.

Coffee morning sendiri menghadirkan beberapa pembicara seperti Ketua Umum Indonesian Geothermal Association (INAGA) Abadi Poernomo yang memaparkan tentang kendala & Usulan bagi Pengembangan dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi. Materi kedua adalah Kendala & Usulan bagi Pengembangan dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air yang disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengembang PLTA (APPLTA) M. Riza



Ronggo Kuncahyo menegaskan pemerintah terus mendorong pemanfaatan EBT



Peserta coffee morning merupakan stakeholder ketenagalistrikan. Coffee morning dilaksanakan sesuai upacara peringatan HLN ke-70



Sesi diskusi

Husni. Selain itu Nur Pamudji selaku Kepala Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) juga menyampaikan presentasinya. Terakhir Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) Nasri Sebayang menyampaikan posisi PT PLN dalam mendukung dan mengembangkan pembangkit listrik dari energi terbarukan khususnya dari air dan panas bumi.

Coffee morning ini dilaksanakan oleh MKI dengan mengundang para pimpinan perusahaan, pelaku usaha, akademisi dan masyarakat umum. Menurut Ketua Umum MKI Iwan Supangkat, pihaknya selaku mitra pemerintah siap mendukung program pemerintah dan memberikan masukan-masukan berarti khususnya dalam mengembangkan pembangkit listrik dari EBT. (PSJ)



Sistem Pendukung Program 35.000 MW Disiapkan



Pembukaan Pameran dan Seminar HLN ke-70 di ICE, Tangerang pada Selasa (3/11)

Program 35.000 MW merupakan suatu kebutuhan bagi bangsa Indonesia. Untuk itu seluruh sistem pendukung termasuk industri dan tenaga kerja harus dipenuhi. Industri harus memenuhi target konten lokal sedangkan tenaga kerja Indonesia harus kompetitif karena Indonesia akan menghadapi persaingan regional.

Hal tersebut menjadi pembahasan inti yang mengemuka dalam pembukaan Pameran dan Seminar Hari Listrik Nasional ke-70 yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City Tangerang, Selasa (3/11). Diskusi tersebut menghadirkan tiga pembicara yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri. Hadir sebagai moderator diskusi adalah Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Supangkat Iwan Santoso.

Saleh Husin mengajak mengajak MKI bersama PT PLN (Persero) untuk berkoordinasi agar program 35000 MW yang akan dibangun hingga tahun 2019 lebih memprioritaskan tingkat komponen dalam negeri. "Mendorong perindustrian

berarti mendorong perekonomian nasional," ajaknya. Ia berpesan agar pelaku industri ketenagalistrikan menjaga mutu dan *time delivery* agar program ini berjalan dengan lancar.

Hanif Dhakiri menyampaikan bahwa penyerapan tenaga kerja untuk program 35.000 MW adalah 650 ribu sampai tiga juta tenaga kerja. Menurutnya penyerapan itu sangat besar dan membutuhkan perhatian khusus. Hanif menyampaikan bahwa kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan adalah peningkatan potensi ketenagakerjaan. Namun hal itu tidak dapat semata-mata dilakukan pemerintah. Ia mengajak seluruh *stakeholder* seperti balai latihan kerja hingga pelaku industri memberikan perhatian pada aspek ketenagakerjaan.

"Salah satu poin penting adalah standar kompetensi tenaga kerja," ungkap Hanif. Menurutnya saat ini belum ada clustering jabatan-jabatan di kelistrikan. Untuk menjadi ahli kelistrikan menurutnya saat ini harus mendapat banyak sekali sertifikat kompetensi.

"Indonesia hobi membisniskan yang printil-printil. Ini harus diatur" tegasnya.

Pihaknya akan membuat sertifikasi untuk ahli ketenagalistrikan menjadi lebih sederhana. Hanif juga mengajak para pelaku industri ketenagalistrikan memperhatikan aspek keselamatan kerja. Ia berbagi pengalaman bagaimana suatu pengalaman dan otodidak menjadi hal penting di luar pendidikan formal.

"Banyak yang ahli listrik bukan karena sekolah, hal tersebut menjadi perhatian" ujarnya. Hanif juga mengajak para pelaku industri untuk lebih memperhatikan aspek keselamatan kerja. Menurutnya K3 bukanlah beban namun suatu investasi bagi perusahaan. Menteri ESDM dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa perizinan di sektor ESDM khususnya ketenagalistrikan akan terus diperingkas dan dipercepat.

"Semakin banyak izin, semakin banyak interaksi, semakin banyak transaksi," tuturnya. "Saya mendorong segala sesuatu lebih realistis dan *down to earth*" tegasnya.

Sudirman Said mengingatkan, ada sejumlah tantangan dalam proyek 35.000 MW antara lain masalah pembebasan lahan, perizinan, harga jual-beli listrik, serta masalah penegakan hukum. Ia meminta semua pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, bahu-membahu menuntaskan program tersebut. (PSJ)



Sesditjen Ketenagalistrikan Sujatmiko (depan pertama dari kiri) menjelaskan kiosk ketenagalistrikan pada Menteri ESDM Sudirman Said (depan kedua dari kiri)



Booth Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pameran HLN ke-70 di ICE, Tangerang

Menteri ESDM Sudirman Said memberikan sambutan dalam pembukaan pameran HLN ke-70



Peran MKI Perlu Terus Ditingkatkan



Sebagai mitra pemerintah, peranan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) diharapkan dapat terus ditingkatkan. Sumbangan pemikiran MKI sangat dibutuhkan pemerintah khususnya dalam mensukseskan program pemerintah 35.000 MW. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman pada penutupan Pameran Hari Listrik Nasional (HLN) ke-70 yang digelar MKI di ICE BSD City Tangerang, Kamis (5/11).

Menurut Jarman, penyelenggaraan HLN ke-70 tahun 2015 ini diselenggarakan dengan sukses oleh MKI. Tahun ini MKI yang sudah tiga kali menyelenggarakan Hari Listrik Nasional bekerja dengan baik dan mampu memberikan semangat tersendiri untuk sektor ketenagalistrikan. Kegiatan seminar dan pameran yang dilaksanakan selama tiga hari sukses menghadirkan tiga Menteri yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri.

"Meski masih ada yang harus diperbaiki namun dari beberapa segi penyelenggaraan HLN tahun ini berjalan dengan lancar dan meriah," ungkapnya.

Melalui penyelenggaraan pameran dan seminar ini Jarman mengharapkan MKI mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan PLN. "Seluruh stakeholder diharapkan memberikan pemikiran-pemikiran kepada pemerintah selaku regulator dan PLN selaku operator utama sektor ini" jelasnya.

Ketua panitia HLN ke70 Sri Andini menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah, peserta pameran dan sponsor yang ikut menyukseskan pameran ini. Ketua umum MKI Supangkat Iwan Santoso juga mengapresiasi kinerja panitia yang dalam waktu singkat mau bekerja siang dan malam untuk lancarnya kegiatan ini.

Penutupan pameran HLN ini dihadiri oleh beberapa pimpinan dan anggota MKI, peserta pameran dan pengunjung. Jarman mengapresiasi keikutsertaan beberapa Perguruan Tinggi dalam pameran HLN ini. Ia berharap di tahun-tahun mendatang jumlah perguruan tinggi yang mengikuti pameran semakin meningkat. "Selamat kepada panitia khususnya Bu Sri andini selaku ketua panitia. Cukup jauh dari Jakarta tapi banyak juga yang hadir," ungkapnya. "Tahun depan saya harapkan MKI akan lebih baik lagi" harapnya. (PSJ)





KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Membangun Kedaulatan Energi

Eksplorasi • Produksi • Diversifikasi • Konservasi

Strategi Pemerintah untuk Dorong Program 35.000 MW

Sejak digaungkan, Program 35.000 MW banyak menarik minat investor untuk turut andil dalam program yang digagas oleh pemerintah ini. Untuk memberikan pemahaman kepada calon investor, Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan paparan mengenai Program 35.000 MW dalam *Executive Breakfast Meeting* dengan tema Program 35.000 MW: Peluang dan Tantangan Bagi Investor dan Pemerintah, bertempat di The Plaza Office Tower (20/10).

Setelah pembukaan oleh Claudia Lauw Lie Hoeng dari Deloitte Indonesia, diskusi panel dilakukan dengan moderator M. Ikhsan dari Universitas Indonesia. Ikhsan membuka diskusi dengan memberikan gambaran mengenai kebutuhan listrik di Indonesia yang sangat besar di masa mendatang. Ia

lalu mengajukan tiga pertanyaan untuk Jarman terkait Program 35.000 MW, yakni mengenai kebijakan pemerintah secara umum untuk program ini, solusi pemerintah untuk mengatasi permasalahan pembebasan lahan serta isu kehutanan untuk pembangkit panas bumi, dan mengenai kebijakan tarif dan subsidi.

Jarman menjelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk mendorong percepatan pembangunan ketenagalistrikan. Di awal tahun ini, Kementerian ESDM mengeluarkan dua peraturan menteri (Permen), yakni Permen ESDM Nomor 1/2015 dan Permen ESDM Nomor 3/2015. Dalam Permen Nomor 1/2015 dinyatakan bahwa antar pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha yang telah beroperasi,

dapat bekerja sama secara langsung dan tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik yang baru.

Sementara itu, Permen 3/2015 mengatur tentang prosedur pembelian tenaga listrik dan harga patokan pembelian tenaga listrik melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Dalam Permen itu ditetapkan mengenai *ceiling price* (harga patokan) dimana jika harga sudah masuk dalam *ceiling price*, maka bisa langsung dilakukan kerja sama tanpa harus melewati persetujuan lagi dari Menteri.

Permen tersebut juga mensyaratkan uji tuntas atas kemampuan teknis dan finansial pengembang untuk menjaga supaya pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik berjalan lancar. Ini juga untuk menghindari kegagalan



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan strategi pemerintah untuk dorong Program 35.000 MW



Acara Executive Breakfast Meeting ini diselenggarakan di The Plaza Office Tower dan diprakarsai oleh Deloitte Indonesia

seperti pada *Fast Track Programme* (FTP) I dan II yang memenangkan lelang berdasarkan harga terendah.

Lebih lanjut, Jarman mengungkapkan jika Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) juga sudah mengurangi perijinan. Sebagian besar perijinan di bidang ketenagalistrikan kini diserahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Jarman meyakinkan jika proses perijinan akan dilakukan dengan transparan.

Program 35.000 MW diperkirakan menelan biaya hingga 1.100 triliun rupiah. "Ini tentunya sangat berat bagi PLN," tutur Jarman. Oleh karenanya, PLN hanya mendapat porsi 25% dalam program ini sementara yang 75% akan diserahkan ke *Independent Power Producer* (IPP). Pemerintah meminta PLN untuk lebih fokus membangun jaringan transmisi listrik.

"Transmisi ini sangat penting dan

harus dikontrol oleh pemerintah," ujar Jarman. Terkait pembangunan pembangkit listrik di hutan, Jarman mengungkapkan sekarang sudah ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Pada intinya, pembangkit listrik panas bumi kini bisa dibangun di kawasan hutan. Tarif untuk panas bumi juga sudah dibuat menarik untuk investor sehingga diharapkan mereka mau berinvestasi untuk pembangkit listrik panas bumi di Indonesia.

Sehubungan dengan masalah pembebasan lahan, Jarman mengatakan sudah ada Undang-Undang Nomor 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Ia mencontohkan PLTU Batang yang awalnya lama terkendala pembebasan lahan – lebih dari tiga tahun – tapi kini lahan di sana sudah mulai dibebaskan.

Subsidi juga menjadi hal yang dibahas dalam pertemuan kali ini. Jarman menyebutkan di awal ia menjadi

Dirjen, hampir semua pelanggan PLN mendapatkan subsidi. Namun sekarang pemerintah mengurangi subsidi dan mulai memperkenalkan *automatic tariff adjustment* yang didasarkan pada tiga hal, yakni harga ICP (patokan harga minyak Indonesia), kurs dollar, dan inflasi.

Subsidi nantinya akan memberikannya kepada yang benar-benar membutuhkan. "Mulai tahun 2016, yang tidak mempunyai Kartu Miskin dilarang menikmati subsidi listrik," tegas Jarman.

Jarman menambahkan, DJK dan PLN akan mendatangi daerah-daerah di Indonesia untuk memberikan sosialisasi mengenai kebijakan yang rencananya diberlakukan per Januari 2016 ini. Sosialisasi juga akan dilakukan melalui media cetak dan elektronik. Menurut Jarman, subsidi listrik ini diharapkan lebih bermanfaat dibanding jika dalam bentuk uang. (AMH)

Karya Anak Negeri Harus Diapresiasi

Program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang akan dibangun hingga tahun 2019 memberikan banyak kesempatan kepada industri dalam negeri. Dengan program ini sekitar 650.000 tenaga kerja langsung dan 3 juta orang tenaga kerja tak langsung akan menerima manfaat. Penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri diperkirakan akan menyentuh 40 persen (setara dengan Rp440 triliun) dari total kebutuhan investasi. Untuk Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman mengapresiasi langkah Majalah Listrik Indonesia yang memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri yang mampu memberikan kontribusi positif bagi sektor kelistrikan Indonesia.

Dalam pembukaan Pameran Kelistrikan Indonesia 2015 yang dilaksanakan di Grand City Surabaya, Rabu (21/10), Jarman menyampaikan bahwa *Electricity Award* yang diberikan oleh Majalah Listrik Indonesia bekerjasama

dengan Majalah SWA adalah suatu langkah positif menghargai karya anak bangsa. Menurutnya pengelolaan energi harus dikelola dengan baik dan seimbang.

"Pihak asing punya penandaan, perlu diundang (berinvestasi), tapi kita juga perlu meningkatkan komponen dalam negeri," tegas Jarman. Dengan begitu menurutnya Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara ASEAN baik dalam hal rasio elektrifikasi maupun konsumsi listrik perkapita nasional.

Pada pembukaan pameran ini diserahkan pula penghargaan Indonesia Best Electricity Award (IBEA). Pada IBEA 2015 ini, kategori penilaiannya meliputi *Best Services*, *Best Independent Power Producers (IPP)*, *Best Operation & Maintenance [O&M]*, serta 10 perusahaan terbaik. Sebagai juri dalam penghargaan tersebut diantaranya Anggota Dewan

Energi Nasional (DEN) Tumiran, Komisaris PT PLN (Persero) Milton Pakpahan, serta redaksi dari Majalah Listrik Indonesia, Majalah SWA dan beberapa pakar kelistrikan lainnya.

Jarman sangat mengapresiasi kerja panitia pameran kelistrikan Indonesia dan juri yang telah mempersiapkan penghargaan ini. Ia berharap penghargaan ini mampu menginspirasi perusahaan-perusahaan di sektor ketenagalistrikan lainnya untuk bekerja lebih baik ke depannya. Ia menitip pesan agar perusahaan-perusahaan tersebut meningkatkan ketahanan energi dengan menjaga kualitasnya.

"Ide penghargaan ini akan memacu perusahaan-perusahaan lain untuk menyediakan listrik yg berkualitas," ujarnya. Jarman juga mengajak perguruan-perguruan tinggi yang memiliki jurusan elektro untuk bersama-sama membantu pemerintah meningkatkan ketahanan energi. (PSJ)



Penyerahan penghargaan dalam Electricity Award 2015

Pengelolaan Energi Butuh Partisipasi Rakyat



Energi merupakan hajat hidup rakyat yang dikelola negara. Untuk itu pemerintah terus bekerja memberikan andil yang besar guna mewujudkan target tambahan kapasitas pembangkit listrik sebanyak 4,2 GW pada tahun 2019 nanti. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul dalam Forum Kelistrikan yang diselenggarakan dalam rangkaian Pameran Kelistrikan Indonesia di Grand City Surabaya, Rabu (21/10).

Upaya pemerintah tersebut disebutkan melalui kebijakan perencanaan program ketenagalistrikan hingga pembuatan peraturan-peraturan untuk mempercepat investasi ketenagalistrikan. Meski dikelola negara, Alihuddin mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat mensukseskan program 35.000 MW.

Alihuddin mengajak peserta forum

untuk menyadari bahwa Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga dalam hal penyediaan kelistrikan. Sebagai gambaran, saat ini rasio elektrifikasi Indonesia masih mencapai 86,35% dimana masih ada sekitar 40 juta penduduk Indonesia belum mendapat listrik. Provinsi Jawa Timur berdasarkan data Kementerian ESDM juga masih 83,55%.

“Walaupun di Surabaya banyak listrik, tapi di Jawa Timur masih banyak yang belum mendapat listrik,” ungkap Alihuddin. Menurutnya pemerataan energi listrik menjadi perhatian penuh pemerintah saat ini.

Mengingat kebutuhan listrik Indonesia yang besar, Anggota Dewan Energi Nasional Tumiran yakin bangsa ini dapat mencapai target pembangunan 35.000 MW dalam lima tahun. Ia juga optimistis bahwa pembangunan tersebut dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga dalam negeri. Mantan

dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada ini mengharapkan partisipasi aktif dari perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki jurusan elektro untuk menyumbangkan saran dalam pengelolaan energi khususnya mewujudkan target program 35.000 MW.

Forum kelistrikan ini merupakan rangkaian acara pameran kelistrikan yang diselenggarakan Majalah Listrik Indonesia. Pameran ini diikuti oleh 100 manufaktur lokal dan global, serta melibatkan seluruh elemen pelaku bisnis kelistrikan. Termasuk di dalamnya subsektor pendukung, asosiasi kelistrikan dari dalam dan luar negeri. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi juga berpartisipasi dalam pameran tersebut untuk mendekati diri ke *stakeholder*. (PSJ)

Pameran Kelistrikan Indonesia 2015

Grand City Surabaya, 21-23 Oktober 2015

Pameran Kelistrikan diselenggarakan di Grand City, Surabaya pada tanggal 21-23 Oktober 2015. Melalui pameran yang diselenggarakan oleh Listrik Indonesia ini, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) memberikan informasi pada pengunjung mengenai Program 35.000 MW yang belakangan ini marak diperbincangkan. DJK juga menyediakan informasi mengenai regulasi dan alur investasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia. (AMH)



Stakeholder Ketenagalistrikan Harus Duduk Satu Meja dan Satu Visi



Sesditjen Ketenagalistrikan Sujatmiko membuka sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan

Pengaturan kewenangan di bidang ketenagalistrikan mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jika dulu bupati/walikota memiliki kewenangan masing-masing di bidang ketenagalistrikan termasuk juga dalam hal pendanaan, dengan Undang-Undang Nomor 23/2014 ini kewenangan diserahkan ke pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur. Hal ini menjadi salah satu pokok bahasan dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang Bidang Ketenagalistrikan di Bandung (22/10).

Selain memperjelas pembagian kewenangan pusat dan daerah, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Ketenagalistrikan Sujatmiko mengharapkan sosialisasi ini juga dapat menjadi ajang saling berkomunikasi antara stakeholder ketenagalistrikan dalam menghadapi tantangan ketenagalistrikan sehingga target 35.000 MW dapat direalisasikan. Sosialisasi ini juga diharapkan dapat membuka masalah-masalah di sektor ketenagalistrikan dan cara penyelesaiannya.

“Tidak mungkin pemerintah, swasta, PLN, dan masyarakat

jalan sendiri-sendiri. Kita harus satu meja, satu visi dengan tugas masing-masing,” ujar Sujatmiko.

Tantangan di bidang ketenagalistrikan memang tak ringan. Sujatmiko mencontohkan sampai Juli 2015, penjualan listrik untuk industri turun hingga 2,3%. Ia mengatakan kalau konsumsi listrik rumah tangga yang turun, itu adalah pertanda baik karena masyarakat menuruti anjuran pemerintah untuk menghemat listrik. Namun kalau konsumsi industri yang turun, itu artinya banyak mesin-mesin produksi yang tidak terpakai maksimal sesuai kapasitasnya. Artinya pula, output turun dan ada ini dapat berimbas pada tenaga kerja; termasuk kemungkinan merumahkan para pekerja industri.

Inilah yang membuat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ketiga yang di antaranya adalah diskon listrik industri hingga 30% dari pukul 23.00 sampai 08.00. Tarif listrik untuk industri juga turun secara konsisten melalui skema *tariff adjustment* yang didasarkan pada tiga hal yakni: ICP (*Indonesian Crude Oil Price*), kurs rupiah terhadap dollar, dan inflasi. PLN juga memberikan *grace period* untuk penundaan tagihan listrik industri. Paket

Warta Kita



kebijakan ini berdampak positif pada industri yang terlihat dari peningkatan pemakaian listrik industri pada Agustus 2015.

"Kita mempunyai semangat untuk terus memperbaiki efisiensi pembangkit dan distribusi sehingga harga listrik industri bisa turun. Ini tentunya akan menambah daya saing industri kita," tutur Sujatmiko dalam sambutannya. Ia melanjutkan, "Listrik merupakan komponen dasar industri. Kalau tidak kompetitif, ke depan akan berat."

Sujatmiko juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang membuat rancangan keputusan presiden (kepres) tentang percepatan infrastruktur ketenagalistrikan. Regulasi ini diharapkan dapat mempercepat PLN dalam pengadaan dan pembebasan lahan, perijinan dan lainnya. Ia menyampaikan, percepatan ini penting dilakukan karena sampai Agustus 2015, proyek-proyek transmisi di Jawa-Bali baru tercapai 9% dari target 100%. Capaian gardu induk baru 16%.

"Kalau tidak melakukan upaya luar biasa, kita khawatir target 35.000 MW di tahun 2019 tidak tercapai," ungkapnya.

Terkait perijinan, Sujatmiko menyatakan bahwa nantinya hanya akan ada tiga jenis perijinan di bidang ketenagalistrikan, yakni ijin di bidang hulu (pembangkitan), ijin di bidang hilir (pengusahaan), dan ijin penunjang (termasuk untuk pemanfaatan jaringan). Hal lain seperti persetujuan harga,, keselamatan kerja, masalah lingkungan dan lainnya akan menjadi standar bagi pemohon ijin. Pemerintah hanya akan mengeluarkan check list, jika standar terpenuhi, ijin akan jalan terus dan tidak akan ditunda-tunda. Ia mengharapkan pihak yang mengurus perijinan dapat proaktif untuk mengecek status perijinan di masing-masing instansinya.

Selain itu, Sujatmiko juga menyoroti pemberian subsidi listrik bagi masyarakat tidak mampu. Jika dulu subsidi diberikan pada mereka yang memasang daya berkapasitas 450 VA dan 900 VA, tahun depan hal tersebut akan berubah. Sujatmiko menjelaskan, kenyataan di lapangan menunjukkan jika mereka yang memasang daya 450 VA dan 900 VA tidak serta-merta miskin. Subsidi listrik memang dipangkas dari 66 triliun tahun ini, turun menjadi 33,6 triliun di tahun 2016. Sujatmiko menyampaikan pemerintah baik pusat maupun daerah dan PLN akan bekerja keras untuk mereklasifikasi kriteria masyarakat tidak mampu hingga mereka yang benar-benar membutuhkan yang akan mendapatkan subsidi listrik. (AMH)



Atas - Narasumber sosialisasi berasal dari DJK, PLN, dinas daerah

Tengah - Seorang peserta bertanya dalam sesi tanya-jawab

Bawah - Kepala Seksi Penyertaan Modal Pemerintah Yeni Gusrini merupakan salah satu narasumber dari DJK

Kementerian ESDM Berpartisipasi Dalam IIICE 2015



Wakil Presiden Jusuf Kalla mendengarkan penjelasan dari salah satu staf DJK mengenai progres Program 35.000 MW

Kementerian ESDM berpartisipasi dalam pameran *Indonesia International Infrastructure Convention dan Exhibiton (IIICE) 2015* di *Jakarta Convention Center (JCC)* pada tanggal 4-6 November 2015. *Booth* yang disediakan oleh Kementerian ESDM menampilkan beragam informasi mengenai sektor energi dan sumber daya mineral termasuk peraturan terbaru, dan juga menyediakan survey kepuasan publik terhadap pelayanan informasi publik di Kementerian ESDM.

Ditjen Ketenagalistrikan sebagai unit di bawah Kementerian ESDM juga turut menampilkan capaian dan regulasi di bidang ketenagalistrikan dalam setahun terakhir ini dan memberikan gambaran mengenai Program 35.000 MW.

IIICE 2015 merupakan salah satu acara dalam rangkaian kegiatan tahunan *Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2015* yang diprakarsai oleh KADIN Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka IIW 2015 pada Rabu (4/11) di JCC.

"Bicara tentang infrastruktur tidak akan pernah berhenti. Kebutuhan selalu meningkat baik dari segi kualitas maupun jumlahnya. Tidak cukup dengan bicara, tapi harus dikerjakan bersama-sama," ujar Jusuf Kalla saat menyampaikan sambutannya.

Wakil Presiden menambahkan bahwa kebutuhan infrastruktur Indonesia sangat besar. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibanding negara-negara ASEAN lainnya.

"Infrastruktur untuk negara kepulauan jauh lebih besar dibanding negara daratan," tambahnya.

Jusuf Kalla juga sempat membahas mengenai kebutuhan listrik masyarakat Indonesia yang besar. Menurutnya, dibutuhkan pembangunan yang lebih cermat dan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia.

Setelah membuka IIW 2015, Jusuf Kalla mengunjungi pameran IIICE 2015. *Booth* Kementerian ESDM menjadi salah satu *booth* yang dikunjungi oleh Wakil Presiden. Program 35.000 MW termasuk topik yang paling banyak diminati, ini terlihat dari banyaknya pertanyaan pengunjung pameran mengenai program pemerintah yang dicanangkan sejak Mei 2015 ini, tak terkecuali Wakil Presiden Jusuf Kalla. Petugas *booth* menjelaskan tentang capaian Program 35.000 dan capaian sektor ESDM secara umum dalam setahun terakhir ini. (AMH)



Pengunjung mengisi survey keterbukaan informasi publik yang disediakan di booth Kementerian ESDM

PLN Diharapkan Fokus pada Distribusi dan Transmisi Listrik



Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul dalam konferensi pers di DJK, Jakarta (6/11)

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur listrik di Indonesia sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan karena masih banyak daerah di Indonesia yang masih belum teraliri listrik. Untuk itu program pembangkit listrik 35.000 MW harus bisa tercapai sesuai target.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta (6/11) mengatakan pemerintah telah merencanakan siapa saja yang nantinya akan *supply power*, yaitu 75% dari IPP (*Independent Power Producer*) dan 25% dari PT PLN (Persero).

"Ke depan PLN kita harapkan akan membangun gardu-gardu untuk distribusi yang lebih luas dan lebih baik sehingga daya energi yang diproduksi oleh IPP akan tersalurkan dengan baik ke pelanggan," ujar Ali. Jadi, pemerintah mengharapkan ke depannya PLN hanya mengurus distribusi dan transmisi listrik ke masyarakat dan tidak lagi terlalu memikirkan tentang pembangkit.

"Dengan demikian, rasio resiko kerugian di dalam PLN akan semakin turun, dan PLN akan mendapatkan untung yang lebih baik untuk menjaga stabilitas sistem PLN dalam menyediakan listrik ke masyarakat. Jadi PLN tidak memikirkan pembangkit lagi, tapi bagaimana distribusi dan transmisi listrik ke masyarakat di seluruh Indonesia menjadi lebih baik," Ali kembali menegaskan.

Mengenai revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang baru, hingga saat ini PLN belum memberikannya kepada pemerintah. Revisi ini terkait dengan rencana awal dimana PLN mengerjakan 10.000 MW dari target program 35.000 MW, sekarang diganti menjadi PLN hanya mengerjakan 5.000 MW saja. Karena belum diserahkan oleh PLN, maka saat ini PLN masih menggunakan RUPTL yang lama.

"PLN belum selesaikan RUPTL untuk tahun ini. Pak Menteri (Menteri ESDM Sudirman Said - red) sudah ngejar-gejar agar ada acuan ke depan untuk membangun pembangkit listrik," pungkas Ali. (UH)

Para wartawan menyimak paparan dari Alihuddin Sitompul mengenai pengembangan infrastruktur listrik di Indonesia



Peluang Usaha Penunjang Ketenagalistrikan Semakin Terbuka



Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Sujatmiko menyampaikan sambutan pada peresmian Pabrik ABB



Menurut Sujatmiko, Program 35.000 MW juga akan membuka lapangan kerja yang luas.

Program 35.000 MW yang akan dibangun hingga tahun 2019 membuka kesempatan luas bagi sektor penunjang ketenagalistrikan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Sujatmiko saat menghadiri peresmian beroperasinya pabrik panel listrik tegangan menengah PT ABB di Tangerang, Rabu (7/10). Menurutnya dengan program 35.000 MW, Industri Indonesia akan tumbuh karena 75.000 set tower transmisi dan 1.382 unit gardu induk akan dibangun. "Selain itu kita akan menggunakan 301.500 km konduktor aluminium, 2.600 set trafo, serta 3,5 juta ton baja profil dan pipa luar pembangkit," ungkapnya.

Menurut Sujatmiko, Program 35.000 MW juga akan membuka lapangan kerja yang luas. Sekitar 650.000 tenaga kerja langsung dan 3 juta orang tenaga kerja tak langsung akan menerima manfaat dari program ini. Ia juga mengatakan bahwa penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) diperkirakan akan menyentuh 40 persen (setara dengan Rp440 triliun) dari total kebutuhan investasi.

Sujatmiko mengatakan bahwa pembangunan pabrik usaha penunjang ketenagalistrikan seperti ini perlu diapresiasi karena merupakan suatu komitmen dalam menyediakan layanan yang lebih cepat kepada perusahaan ketenagalistrikan maupun industri lainnya. Ia berharap ke depan, usaha penunjang dapat terus membangun pabrik-pabrik yang menghasilkan produk dalam negeri untuk mendukung

program-program pemerintah di sektor ketenagalistrikan.

Perusahaan-perusahaan penunjang ketenagalistrikan melihat bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan memiliki kekuatan ekonomi yang terus berkembang dan diperhitungkan secara global. *Switchgear* yang diproduksi di pabrik baru ini akan mendukung distribusi energi listrik secara efisien dan andal dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik.

Fasilitas produksi seluas 3.700 meter persegi yang terletak di Tangerang ini memproduksi rangkaian produk AIS tegangan sedang, seperti UniSwitch, UniSec, UniGear dan UniGear Digital. Pabrik semi otomatis ini dirancang untuk menjalankan proses produksi yang efisien dengan kapasitas mencapai 4.000 panel switchgear per tahun. Fungsi *switchgear* dalam sebuah sistem energi listrik adalah mengendalikan, melindungi dan mengisolasi peralatan listrik untuk menjaga kestabilan suplai listrik. (PSJ)

Program Lises dan Instalasi Listrik Gratis Efektif Percepat Angka RE

Saat ini masyarakat Indonesia masih banyak yang bermimpi menikmati listrik. Dua program pemerintah yaitu program listrik perdesaan (lises) dan program instalasi listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu dinilai efektif untuk mempercepat akses masyarakat dalam menikmati listrik. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman saat mendampingi kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Senin (9/10).

Menurutnya dua program pemerintah tersebut mampu menaikkan angka Rasio Elektrifikasi (RE) dengan signifikan dalam lima tahun terakhir.

Hingga akhir semester I tahun 2015, rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 86,36%. Angka ini meningkat 19,21% dibandingkan tahun 2010 yang baru mencapai 67,15%. Angka rasio elektrifikasi Provinsi DIY sendiri saat ini berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM Provinsi DIY mencapai 86,28%. Penghitungan RE menjadi salah satu fokus perhatian Komisi VII DPR RI. Dalam pembahasan tersebut agar tidak terjadi reduksi data, disepakati bahwa PT PLN (Persero) hanya akan mengeluarkan jumlah pelanggan.

“Sedangkan yang akan menghitung RE adalah pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan,” ungkap Jarman.

Kunjungan kerja Komisi VII dalam masa reses akhir tahun 2015 ini dilaksanakan di dua tempat yaitu Provinsi DIY dan Provinsi Bangka Belitung. Ketua Komisi VII Kardaya Warnika sebagai pimpinan rombongan diterima oleh Sekda

Provinsi DIY yang dihadiri perwakilan dari Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Riset-Dikti, Pertamina, SKK Migas, BPH Migas, PT PLN, dan PT PGN.

Selain mendengarkan aspirasi masyarakat Yogyakarta, Komisi VII juga ingin meninjau langsung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Samas, Bantul DIY.



Pembangunan PLTB dan pembangkit listrik tenaga sampah yang dikembangkan di Yogyakarta menarik perhatian Komisi VII DPR RI. Menurut anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Nasdem Kurtubi, pihaknya ingin menjadikan PLTB di Yogyakarta sebagai percontohan untuk konstituennya di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kunjungan ke PLTB Samas sendiri dilaksanakan Selasa (10/10) yang dihadiri Komisi VII DPR RI dan Dirjen EBTKE Rida Mulyana. Sekretaris Dirjen Ketenagalistrikan

Sujatmiko juga hadir dalam kunjungan lapangan mewakili Jarman yang harus kembali ke Jakarta karena ada agenda lain. (PSJ)

Mulai Januari 2016, Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Dilakukan Secara Online

Dalam *coffee morning* yang diselenggarakan Jumat (13/11), Ditjen Ketenagalistrikan memperkenalkan sistem database Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman, prinsip pertama dari sistem ini adalah bersifat relaksasi yaitu memberi kelonggaran dan kemudahan sekaligus memberi kepastian. Selanjutnya menurutnya database ini bersifat *self-assesment*.

"Jika data-data yang diberikan sudah benar maka sistem akan mendaftarkan dan memberikan nomor registrasi bagi seluruh badan usaha jasa penunjang," ungkap Jarman.

Sistem database Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik ini merupakan sistem database ketiga di sektor ketenagalistrikan setelah sebelumnya Ditjen Ketenagalistrikan meluncurkan Sistem database Registrasi Sertifikat laik Operasi (SLO) dan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SISKTTK). Sistem secara online ini akan diterapkan mulai 1 Januari 2016.

"Mulai saat ini hingga Januari nanti akan diterapkan transformasi dari data-data manual ke sistem online," jelas Jarman. "Tidak ada lagi sertifikasi yang diterbitkan oleh kantor kami secara manual, semua melalui sistem," lanjutnya.

Menurut Jarman, jika semuanya sudah dalam kondisi online yang tertata baik, Ditjen Ketenagalistrikan akan mengintegrasikan keseluruhan sistem yang ada. Menurut Jarman nantinya SLO tidak akan terbit jika yang melaksanakannya tidak punya registrasi dari SBU. Sedangkan SBU tidak terbit jika tidak ada penanggung jawab dari tenaga kompetensi. Menurutnya para pelaku usaha nanti

ke kantor Ditjen Ketenagalistrikan bukan untuk mengajukan izin karena semua sudah dilakukan secara online, tapi untuk rapat atau mediasi jika ada permasalahan. Menurutnya SLO yang rata-rata 10.000 aplikasi per hari bisa diselesaikan dengan baik, maka SBU yang tidak terlalu banyak juga akan dapat diselesaikan dengan baik.

Presentasi mengenai Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang sendiri dipaparkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad. Menurut Munir untuk

Sertifikasi jenis usaha Pembangunan dan Pemasangan, penerbit SBU sudah dilakukan oleh PT AK Lima dan PT Sertikolindo. Sedangkan untuk jenis usaha lain seperti Konsultasi dalam bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik, Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik, Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik, serta Sertifikasi Kompetensi Tenaga



Dalam coffee morning pada Jumat (13/11), Dirjen Ketenagalistrikan Jarman memperkenalkan sistem database Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Teknik Ketenagalistrikan masih diterbitkan oleh Ditjen Ketenagalistrikan. Ia berharap lembaga sertifikasi badan usaha segera menyiapkan diri secara baik untuk bisa menerbitkan SBU.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 62/2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, dalam menerbitkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik, pemerintah daerah provinsi seharusnya mensyaratkan SBU sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat (4) PP Nomor 62/2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Selain itu Pemerintah Daerah dan PT PLN (Persero) hendaknya mensyaratkan SBU Ketenagalistrikan dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam pengadaan barang/jasa elektrikal dan mekanikal. (PSJ)

Proses Perizinan Ketenagalistrikan Diharapkan Dapat Lebih Ringkas



Tamba P. Hutapea dalam coffee morning (13/11) menyatakan metode HGSL merupakan salah satu cara untuk menyederhanakan perizinan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM) dalam satu tahun terakhir telah menyederhanakan proses perizinan bidang ketenagalistrikan dari 52 jenis izin menjadi 25 jenis izin dan 923 hari menjadi 256 hari. Meski kinerjanya diapresiasi, PTSP BKPM diharapkan melakukan kajian pada proses perizinan ketenagalistrikan sehingga perizinan ketenagalistrikan hanya menyisakan lebih sedikit prosedur dan singkatnya waktu perizinan. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi kedua pelaksanaan *coffee morning* sosialisasi Peraturan Menteri ESDM No. 31 Tahun 2015 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan hari Jumat (13/11).

Diskusi yang menghadirkan Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tamba P. Hutapea sebagai pembicara ini banyak memberikan informasi kepada para pelaku usaha sub sektor ketenagalistrikan yang hadir pada *coffee morning* tersebut. Menurut Tamba, permasalahan perizinan adalah banyaknya jenis perizinan dan saling mempersyaratkan, sehingga perlu penyederhanaan untuk mempersingkat waktu, terutama perizinan lahan/pertanahan, lingkungan, dan daerah.

"Metode yang digunakan untuk penyederhanaan perizinan adalah Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan (HGSL) serta penyederhanaan administrasi proses perizinan," ungkap Tamba. Menurutnya BKPM telah melakukan perubahan Permen Baru dari Kementerian/Lembaga untuk mendukung PTSP Pusat Ketenagalistrikan dari sektor agraria, sektor kehutanan dan sektor perhubungan.

Dalam paparannya Tamba menyampaikan kemajuan investasi sektor ketenagalistrikan. Per tanggal 5 November 2015 sebanyak 96 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) telah memperoleh Izin Prinsip dari BKPM untuk sektor ketenagalistrikan dengan total kapasitas 25.006 MW dan nilai investasi sebesar US\$ 34 Milyar. Selain itu 77 perusahaan Pananaman Modal Dalam Negari (PMDN) dengan total kapasitas 4.973 MW dan nilai investasi sebesar Rp 110,9 Triliun. Dari catatan PTSP BKPM 52 perusahaan telah memperoleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTL-S) dari PTSP Pusat dengan total kapasitas 6.026,1MW. Sementara itu 34 perusahaan telah memperoleh IUPTL dari PTSP Pusat dengan total kapasitas 809,3 MW.

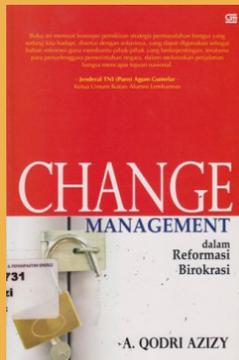
Menurut Tamba, anggaran pemerintah pusat dan daerah hanya mampu menutup 50% dari total kebutuhan investasi. Menurutnya hal ini merupakan peluang besar untuk partisipasi investasi swasta, termasuk *Public Private Partnership* (PPP) sebanyak 141 Miliar USD atau 1.692 triliun rupiah. Tamba menyampaikan tiga prioritas utama BKPM saat ini adalah percepatan pelayanan perizinan, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta *debottlenecking* permasalahan investasi.

"Tujuan PTSP Pusat adalah tercapainya proses perizinan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi," ungkapnya. Konsep PTSP Pusat menurutnya adalah investor cukup datang ke BKPM sebagai penyelenggara PTSP Pusat untuk mengurus perizinan investasi, tidak perlu lagi berkeliling kantor Kementerian/Lembaga. Selain itu investor dapat memonitor proses perizinan secara online serta memperoleh kepastian mengenai tenggat waktu perizinan.

Menteri ESDM sendiri telah mendelegasikan wewenang penerbitan 10 izin usaha ketenagalistrikan kepada Kepala BKPM Sesuai Permen ESDM No. 35 Tahun 2014, yaitu Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Operasi, Penetapan Wilayah Usaha, Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika, Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi, Izin Panas Bumi, Persetujuan Usaha Penunjang Panas Bumi, serta Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi. (PSJ)

Change Management dalam Reformasi Birokrasi

Oleh: Ernawaty/Pustakawan Madya



Judul buku : *Change Management* dalam Reformasi Birokrasi
Penulis : A. Qodri A. Azizy
Penerbit : Gramedia, 2007
Tebal : xvii + 142 halaman

Buku *Change Management* dalam reformasi birokrasi ini di dalamnya memuat banyak ide segar dan orisinal, bahkan dalam beberapa hal, cukup agresif dan provokatif dalam pengertian yang positif. Analisisnya cukup radikal dan mendasar. Sekalipun demikian, penuturannya tidak meledak-ledak dan bukan merupakan ungkapan protes atau frustrasi. Istilah yang digunakan dalam judul buku ini pun sungguh menarik, yaitu *change management* birokrasi. Istilah ini tidak biasa dalam dunia birokrasi.

Dengan kajiannya ini, penulis ingin mentransformasikan birokrasi bukan lagi sebagai sosok yang kaku, lamban, ketinggalan terus, selalu menunggu petunjuk, dan otoriter. Birokrasi hendak "disulap" menjadi sosok yang dinamis, kreatif, inovatif, progresif, dan selalu berorientasi ke depan, serta komit pada tanggung jawab.

Penulis membahas birokrasi mulai dari akar munculnya konsep dan teori dari pencetusnya, Max Weber, sampai perkembangan mutakhir di Barat yang populer dengan istilah *New Public Management* (NPM). Namun, penulis juga wanti-wanti dan sekaligus mengkritik mereka yang silau dengan konsep NPM di Barat, khususnya berkaitan dengan "mewirauhakan birokrasi".

Kajiannya bersifat multidisipliner, perpaduan dari ilmu politik, ilmu pemerintahan, manajemen, dan tidak ketinggalan teori-teori perubahan. Namun, tampaknya ia lebih menekankan pendekatan manajemen. Pendekatan ini pula yang ia gunakan ketika membahas soal bersih dari KKN, bukan pendekatan hukum.

Ide-ide segar yang ditawarkan dalam buku ini sangat kita dukung, namun kita menyadari bahwa hasil pemikiran belum seluruhnya dapat dilakukan bersama-sama sekarang ini, karena ada nya beberapa kendala. Buku ini sangat inspiratif, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Buku ini sangat perlu dijadikan bahan diskusi oleh para akademisi, khususnya mereka yang berkecimpung di perguruan tinggi. Dan seharusnya juga menjadi buku wajib bagi mereka yang telah atau yang akan menduduki jabatan eselon satu dan eselon dua. Ada banyak tips dan sekaligus kritik untuk para pejabat tersebut.

Kehidupan kita berbangsa dan bernegara tidak dapat dilepaskan dari peran birokrasi sebagai salah satu penyangga utamanya. Dan kita ditantang serta termotivasi untuk mewujudkan kinerja birokrasi yang mampu membawa bangsa kita meraih sukses di tengah kehidupan global ini.

Komunikasi *Stakeholder* Ketenagalistrikan Perlu Terus Dijaga



Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra dalam Sosialisasi Bidang Investasi dan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Banjarmasin (16/11) menyampaikan bahwa sosialisasi diselenggarakan sebagai ajang komunikasi antar stakeholder serta untuk memberikan informasi terbaru terkait kebijakan ketenagalistrikan

Komunikasi antara semua pemangku kepentingan di subsektor ketenagalistrikan harus terus dijaga agar hal-hal yang menjadi kendala bisa diselesaikan dengan baik. Demikian disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra saat membuka Sosialisasi Bidang Investasi dan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Banjarmasin (16/11).

Selain untuk menjaga komunikasi, sosialisasi juga diselenggarakan untuk memberikan informasi terbaru

terkait kebijakan ketenagalistrikan. Satya mendorong peserta sosialisasi yang berasal dari pemerintah daerah, PT PLN (persero), dan swasta untuk tak ragu bertanya pada narasumber terutama mengenai peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Satya menyampaikan pemerintah telah melakukan terobosan-terobosan guna mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik, antara lain dengan memangkas perizinan dan melimpahkannya pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Warta Kita

"Perizinan sudah di PTSP. Investor bisa datang langsung ke BKPM untuk menanyakan hal-hal yang diperlukan. Izin lain seperti Izin Kehutanan juga sudah ada di sana. Ini diharapkan dapat mempersingkat waktu," ujar Satya.

Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 1/2015 dan Permen ESDM Nomor 3/2015 untuk memudahkan proses negosiasi yang dulu sering menjadi kendala. Satya menyoroti banyaknya salah tafsir mengenai Permen ESDM Nomor 3/2015.

Ia menuturkan, harga patokan dalam peraturan menteri tersebut digunakan untuk penunjukan dan pemilihan langsung, bukan untuk lelang.

"Terobosan-terobosan tersebut dilakukan pemerintah untuk mempermudah PLN supaya listrik tersedia sesuai keandalan yang kita inginkan. Kalau tersedia tapi byarpet juga tetap jadi kendala. Inilah harapan kita semua, mudah-mudahan hal ini dapat sinkron dengan pemda setempat dan PLN. Oleh karena itu, kita berkumpul di sini, untuk berdialog langsung," tutur Satya.

Permen ESDM Nomor 1/2015 juga memungkinkan kerjasama penyediaan tenaga listrik antar wilayah usaha. Ini diharapkan dapat meringankan beban finansial PLN.

"Kalau tidak, penyediaan tenaga listrik akan semakin lama padahal kebutuhan semakin meningkat," Satya menambahkan.

Peran pemerintah daerah ke depan akan semakin meningkat. Jika kebutuhan listrik di suatu daerah tinggi, pemerintah daerah bisa membuat izin wilayah usaha untuk keperluan mereka sendiri.

"Silahkan saja, tapi jangan sampai bermasalah. Ada beberapa daerah yang sudah memperoleh izin wilayah usaha namun ternyata tidak jalan. Ini tidak kami harapkan," lanjut Satya.

Mengakhiri sambutannya, Satya menghimbau agar badan usaha penyediaan tenaga listrik dapat membina hubungan baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitarnya.

"Kami di sini memonitor perjalanan proyek tersebut, apa saja kendalanya. Kami siap membantu memfasilitasi, apakah itu dengan pemda atau PLN. Biasanya kalau ada masalah, IPP baru datang. Tapi kalau tidak ada masalah, tidak lapor. Jangan seperti itu. Kami hanya memonitor supaya kalau ada masalah, bisa kami bantu," pungkas Satya.

Sosialisasi ini menghadirkan pembicara dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK), PLN, dan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Saat sesi diskusi berlangsung, salah seorang peserta menanyakan hal-hal yang dilakukan PLN untuk mendorong Program 35.000 MW. Budi Khairudin, narasumber dari PLN, menjelaskan jika PLN telah melakukan restrukturisasi organisasi supaya lebih fokus pada Program 35.000 MW dimana setiap regional diberikan wewenang mulai dari perencanaan, pembangunan hingga operasi. PLN juga lebih intensif melakukan komunikasi dengan pemerintah dan menyampaikan laporan permasalahan yang dihadapi PLN dalam program tersebut. (AMH)

Ditjen Ketenagalistrikan Selenggarakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Setiap Pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dalam jangka waktu paling lambat sepuluh hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Hal tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman saat menyampaikan sambutan pembukaan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan *Whistleblowing System* di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan yang dilaksanakan pada Rabu (25/11).

Sosialisasi ini mengundang nara sumber Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Muchtar Husein dan Direktur Tipikor Mabes POLRI, Akhmad Wiyagus. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad.

Jarman menyampaikan bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah

menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ia berharap aturan-aturan mengenai pengendalian gratifikasi ini dapat ditaati oleh seluruh pejabat dan pegawai di Ditjen Ketenagalistrikan. Ia mengapresiasi kehadiran kedua pembicara dan berharap semua pihak dapat mengambil manfaat dari acara ini

Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Muchtar Husein menyampaikan pengertian dari gratifikasi. Sesuai aturan yang berlaku, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima oleh pegawai baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ditjen Kementerian ESDM berpendapat bahwa penanganan



Irjen KESDM Muchtar Husein (kiri) dan Direktur Tipikor MABES POLRI Akhmad Wiyagus (kanan) menjadi narasumber dalam Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di DJK (25/11). Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad (tengah) menjadi moderator dalam acara ini.

Dirjen Ketenagalistrikan Jerman menyatakan aturan-aturan mengenai pengendalian gratifikasi agar dapat ditaati oleh seluruh pegawai DJK



korupsi dan gratifikasi memerlukan penanganan pencegahan karena kasus korupsi merusak reputasi (*trust*) instansi maupun individu. Jika terjadi korupsi menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar. Pengembalian atas kerugian keuangan negara yang dikorupsi sangat kecil. "Semakin lama kejadian korupsi tidak terungkap semakin memberi peluang pelaku korupsi untuk menutup-nutupi tindakannya dengan kecurangan yang lain," ungkap Muchtar.

Direktur Tipikor Mabes POLRI, Akhmad Wiyagus menjelaskan hal-hal terkit delik pidana dari gratifikasi dan suap. Ia menyampaikan bahwa subyek dari gratifikasi adalah PNS dan penyelenggara negara. Gratifikasi bisa dikriminalisasi bila menimbulkan konflik kepentingan, adanya niat yang terselubung yang mengganggu independensi penyelenggara negara, serta mempengaruhi obyektifitas dalam pengambilan keputusan.

Menurutnya kunci dari pengendalian gratifikasi terletak pada hati nurani dan gaya hidup masing-masing. Seluruh pegawai mendengarkan dengan penuh seksama hingga selesainya sosialisasi tersebut. Acara ditutup dengan bimbingan teknis cara mengisi pengaduan di website *Whistleblowing System* Kementerian ESDM. (PSJ)



Sosialisasi ditutup dengan penjelasan mengenai cara mengisi pengaduan di website Whistleblowing System KESDM



Pegawai DJK menyimak paparan dalam sosialisasi pengendalian gratifikasi

Outing Pererat Jalinan Kebersamaan



Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengadakan acara outing di kawasan Agrowisata Gunung Mas, Bogor pada 30-31 Oktober 2015. Acara ini dimaksudkan untuk mempererat jalinan kebersamaan antar pegawai serta menumbuhkan semangat kerjasama yang nantinya dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja.



Galeri



Galeri



Kegiatan outing diawali dengan penyampaian progress report masing-masing bagian di Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang dihadiri oleh Seditjen Ketenagalistrikan Sujatmiko. Pagi selanjutnya, outing dimulai dengan melakukan tea walk di Gunung Mas menyusuri hamparan kebun teh yang hijau. Ada pemandu dalam tea walk ini yang menjelaskan mengenai sejarah teh di Indonesia dan jenis-jenis teh yang ada di negeri ini. Acara selanjutnya adalah karaoke dan joged bersama dan diselingi dengan pemberian doorprize. (AMH)



Galeri



Daftar Legislasi & Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK Bulan Januari - November 2015 oleh: Dina Andriani (Pustakawan Muda)

No.	Daftar Legislasi dan Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK
1.	Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
2.	Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik
3.	Peraturan Menteri ESDM No. 02 Tahun 2015 Tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi
4.	Peraturan Menteri ESDM No. 03 Tahun 2015 Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik Dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/ PLTMG, Dan PLTA Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pemilihan Langsung Dan Penunjukkan Langsung
5.	Peraturan Menteri ESDM No. 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
6.	Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2015
7.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran
8.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Dengan Kapasitas Sampai Dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt) oleh PT Perusahaan Listrik Negara
9.	Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral No. 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan
10.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Bangunan Dalam Kawasan Terbatas
11.	Keputusan Menteri ESDM No. 0074 K/21/MEM/2015 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2015 s.d 2024
12.	Keputusan Menteri ESDM No. 0170 K/90/MEM/2015 tentang Pencabutan Keputusan Menteri ESDM No. 3106 K/90/MEM/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Subsektor Ketenagalistrikan
13.	Keputusan Menteri ESDM No. 0171 K/90/MEM/2015 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Penyelesaian Pembangunan Insfrastruktur Ketenagalistrikan Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Insentif Sektor Ketenagalistrikan Dalam Paket Kebijakan Ekonomi III

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Rabu (7/10) kembali merilis paket kebijakan ekonomi jilid III untuk periode awal Oktober. Fokus paket kebijakan kali ini untuk memperbaiki dan mempermudah iklim usaha, serta memperjelas pengurusan perizinan dan syarat berusaha di Indonesia. Dalam paket kebijakan ekonomi tersebut, terdapat tiga insentif yang diberikan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) selaku penyedia jasa ketenagalistrikan untuk sektor industri. Hal tersebut disampaikan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman aid dalam konferensi pers yang dilaksanakan di kantor Direktorat jenderal Ketenagalistrikan Jakarta, Kamis (8/10).

Untuk memberikan stimulus biaya energi untuk energi, PT PLN akan memberikan tiga insentif, yaitu penurunan tarif listrik berdasarkan *tariff adjustment* setiap bulan (dalam tiga bulan terakhir, tarif listrik sudah turun 2,6%), diskon 30% bagi tambahan penggunaan listrik di malam hari (23.00 s.d. 08.00), serta penundaan 40% pembayaran tagihan listrik. Sebelumnya PLN telah menerapkan tarif penyesuaian (*adjustment*). Mekanisme penghitungan *tariff adjustment* PLN sendiri dihitung setiap bulan dengan memperhatikan tiga faktor, yakni nilai tukar Rupiah, harga ICP dan inflasi.

Selain mengumumkan kebijakan paket ekonomi, di sektor ketenagalistrikan Menteri ESDM menyampaikan juga perkembangan mengenai pentingnya pengembangan pembangkit-pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. Pihaknya telah menyiapkan beberapa aturan terkait penggunaan EBT di sektor ketenagalistrikan. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana dalam kesempatan tersebut juga memaparkan mengenai kemajuan pembangkit listrik dengan dari panas bumi, matahari, dan biogas.

“Kami terus berkomitmen melistriki pulau-pulau terdepan dan terluar dengan pembangkit EBT,” ungkap Rida.

Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan Ronggo Kuncahyo dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan perkembangan perizinan sektor ESDM yang telah dilimpahkan di Perizinan Satu Pintu (PTSP) BKPM. Dalam laporannya, Ronggo menyampaikan bahwa 250 izin di sektor ketenagalistrikan telah diterbitkan

sejak 1 Januari 2015. Izin tersebut meliputi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPL-S), Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL) Tetap, Izin Operasi, Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Surat Keterangan Terdaftar Panas Bumi, dan Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Menurut Ronggo, Kementerian ESDM saat ini akan terus berupaya menyederhanakan proses perizinan untuk mempercepat investasi di sektor ESDM.

“ESDM mengupayakan tiga izin untuk masing-masing sektor, yaitu perizinan hulu, hilir, dan jasa penunjang,” ungkap Ronggo. (PSJ)



Penandatanganan kesepakatan bersama tentang pemanfaatan fly ash dan bottom ash dari PLTU diselenggarakan di Auditorium Samaun Samadikun, DJK (16/10)

Limbah PLTU Batubara dapat Dimanfaatkan untuk Pembangunan Infrastruktur

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menandatangani kesepakatan bersama tentang pemanfaatan *fly ash* dan *bottom ash* dari PLTU batubara untuk pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman mewakili Kementerian ESDM dalam penandatanganan kesepakatan tersebut. KLHK diwakili oleh Tuti Hendrawati Mintarsih selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah,

dan Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Kementerian PU-Pera diwakili oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Arie Setiadi Moerwanto. Penandatanganan dilakukan hari ini (16/10) bertempat di Auditorium Samaun Samadikun, Gedung Ditjen Ketenagalistrikan.

PLTU batubara masih mendominasi sistem pembangkitan listrik di Indonesia. Selain karena biaya produksi tenaga listriknya paling murah, sumber daya batubara di Indonesia juga masih yang terbesar dibandingkan sumber energi primer lainnya, yakni mencapai 29,48 milyar ton. Melihat potensi penggunaan batubara yang sangat

besar, limbah dari PLTU batubara baik berupa *fly ash* (abu terbang) maupun *bottom ash* (abu dasar) juga menjadi perhatian pemerintah. Kesepakatan bersama antara tiga kementerian ini dilakukan dalam rangka penanganan *fly ash* dan *bottom ash* tersebut.

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyambut positif penandatanganan kesepakatan bersama ini. Menurutnya, dengan kesepakatan bersama ini limbah PLTU batubara bisa lebih dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif dan penanganannya bisa terkendali.

"Sampai tahun ini saja pembangkit batubara mengkonsumsi hampir 80 juta

Warta Kita

ton per tahun. Kalau Program 35.000 MW jalan, maka di akhir tahun 2019 diperkirakan ada 180 juta ton hingga 209 juta ton batubara yang dibakar. Lima persen dari volume tersebut – sekitar delapan hingga sembilan juta ton – akan menjadi *fly ash* dan *bottom ash*,” ujar Jarman.

Harapan untuk memanfaatkan limbah ini muncul setelah ada terobosan teknologi dimana limbah PLTU batubara tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan infrastruktur, seperti dapat dijadikan campuran semen. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU-Pera Arie Setiadi Moerwanto menambahkan, *fly ash* dan *bottom ash* juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan paving blok, batako, konstruksi beton untuk mengurangi semen, dan dapat dimanfaatkan pula untuk stabilisasi tanah dasar, khususnya jenis tanah ekspasif.

Jarman berharap dengan adanya kesepakatan ini, koordinasi ketiga kementerian bisa berjalan dengan baik. Hal ini juga diharapkan bisa menjadi guidance bagi semua pelaku usaha ketenagalistrikan tentang cara penanganan *fly ash* dan *bottom ash*.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Tuti Hendrawati Mintarsih. Tuti menyatakan KLHK mengapresiasi kesepakatan bersama tersebut.

Ia menjelaskan banyaknya pembangkit yang menggunakan batubara membuat KLHK was-was dengan dampak limbah yang ditimbulkan; sementara banyak industri yang belum bisa menangani limbah itu dengan baik. Terlebih lagi dengan adanya Program 35.000 yang akan menggunakan lebih banyak batubara. Oleh karena itu, ia

menyambut baik kesepakatan ini.

“Dengan memanfaatkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), artinya kita juga menghemat sumber daya. Kita membantu melaksanakan penurunan target emisi sebesar 26%, dan lingkungan pun terjaga dengan baik,” Tuti menjelaskan. Tuti melanjutkan bahwa pihaknya mendorong industri untuk melakukan 3R atau *reuse, reduce, dan recycle* dalam mengelola limbah yang dihasilkan.

Lebih lanjut, Tuti mengungkapkan bahwa sudah saatnya Indonesia menambah sumber daya listrik. Ia mendorong pelaksanaan Program 35.000 MW dan mengharapkan lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses listrik. “Namun kami di KLHK mengantisipasi agar dampak limbah dari pembangkit bisa ditekan,” pungkasnya. (AMH)

Direktur Tuti Hendrawati Mintarsih menyambut baik kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Cara Jitu Mengatur Anggaran Rumah Tangga

Mengatur anggaran rumah tangga adalah suatu hal yang sangat penting, baik bagi keluarga yang memiliki penghasilan pas-pasan maupun bagi yang memiliki penghasilan besar, keduanya harus diatur dengan baik agar bisa memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Apalagi di zaman makin modern dimana bukan lagi hanya seorang suami yang menjadi pencari nafkah, tapi banyak juga istri yang bekerja untuk membantu membiayai rumah tangga maupun hanya sekedar menginginkan memanjakan diri sendiri dengan lebih leluasa menggunakan uang pribadi.

Berikut penulis sampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan saat mengatur anggaran rumah tangga menurut Peni R. Pramono dalam bukunya "Cara Jitu Mengatur Anggaran Rumah Tangga di Masa Krisis".

1. Setelah sepasang pria dan wanita menikah dan menjadi suami istri, maka tidak ada lagi kata "uangku" atau "uangmu". Penghasilan yang didapatkan setelah menikah adalah milik bersama, tentunya dengan porsi yang sudah ditentukan masing-masing misalnya penghasilan suami

untuk kebutuhan rumah tangga dan penghasilan istri bisa sedikit membantu suami ataupun tidak.

2. Menentukan skala prioritas dalam membagi anggaran rumah tangga. Istri dan suami harus memikirkan bersama dengan cermat mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa dikesampingkan. Dengan membicarakannya berdua maka skala prioritasnya bisa seimbang dan adil.

3. Menentukan tujuan dari keluarga itu sendiri misalnya dalam tiga tahun atau lima tahun ke depan akan menambah satu mobil lagi atau mempunyai dua anak. Maka segala sesuatunya harus dipersiapkan yaitu dengan cara menabung menyisihkan beberapa bagian setiap bulannya untuk perencanaan di masa yang akan datang.

4. Cobalah untuk tertib mengelompokkan jenis-jenis pengeluaran setiap bulannya. Bagi kelompok-kelompok pengeluaran rutin per bulan, urutkan berdasarkan prioritas dan tertiblah mengikuti batasan-batasan biaya tersebut.



Tips

Contoh kelompok pengeluaran

●**Pengeluaran rutin rumah tangga:**

belanja sehari-hari, membeli sayur, beras, lauk, gas LPG, gaji pembantu, iuran RT, pajak air, listrik, telepon dan pulsa *handphone*

●**Pengeluaran insidental rumah tangga:**

lampu baru, sumbangan RT, renovasi bagian rumah yang rusak, sumbangan acara keluarga

●**Pengeluaran jangka panjang:**

cicilan rumah, motor, mobil

●**Pengeluaran edukasi:**

uang sekolah, kursus, majalah, koran

●**Pengeluaran pribadi:**

baju, sepatu, fitness, make up

●**Pengeluaran tabungan:**

asuransi, tabungan tetap, arisan

5. Disiplin dalam menggunakan anggaran sesuai skala prioritas dan kelompok-kelompok anggaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Disiplin tersebut misalnya usahakan untuk tidak tergiur membeli barang yang sedang diskon padahal anda belum terlalu membutuhkan barang tersebut, jangan memaksakan untuk membeli barang yang sedang diskon dengan menggunakan uang dari anggaran yang sudah dikelompokkan. Dengan disiplin tersebut maka anggaran akan mencukupi semua kebutuhan yang sudah direncanakan.



6. Hemat bukan berarti mengurangi atau memotong, hemat berarti cerdas menentukan pilihan. Kita tidak harus bangun tengah malam untuk berbelanja di pasar subuh agar mendapatkan harga murah dari lauk untuk makanan hari ini, atau membeli bagian daging yang keras karena lebih murah harganya.

Dengan melakukan hal-hal tersebut belum tentu semua menjadi hemat dan efektif, dengan berbelanja tengah malam



bisa saja kita terkena masuk angin dan menjadi kurang fit pada siang hari karena kurang tidur, dan menyebabkan kita harus berobat dimana kita mengeluarkan biaya untuk pengobatan. Atau dengan membeli daging yang keras maka proses memasak menjadi lebih lama dan gas LPG menjadi lebih boros. Hemat disini adalah dimana kita harus cerdas menentukan pilihan, jadi belum tentu yang lebih murah itu lebih baik, yang lebih mahal dan berkualitas lebih baik juga bisa menjadi pilihan.

Pada dasarnya, pengaturan anggaran rumah tangga kembali ke cara masing-masing keluarga yang tentunya punya pandangan sendiri mengenai cara dan gaya hidupnya, akan tetapi dengan artikel ini semoga bisa membantu kita semua untuk lebih memperhatikan lagi pengaturan anggaran rumah tangga agar bisa selalu mencukupi semua kebutuhan kita. Selamat mencoba! (UH)

Sumber gambar: google



Study Visit ke Perpustakaan di Malaysia

oleh: Dina Andriani/Pustakawan Muda

International Training on Library Management diselenggarakan oleh *International Student Week (ISW)* pada tanggal 14 – 16 Oktober di Kuala Lumpur, Malaysia. Tema *International Student Week (ISW)* adalah Training Manajemen Perpustakaan yang di antaranya mengulas Perpustakaan Negara Malaysia, Perpustakaan Kuala Lumpur dan Perpustakaan Komuniti Kuala Lumpur. Seminar *International Training on Library Management* dilaksanakan pada hari kedua, Kamis tanggal 15 Oktober 2015 bertempat di Perpustakaan Negara Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia terletak di 232 Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Seminar ini dipandu oleh Pustakawan dari Perpustakaan Negara Malaysia Mohd. Afrol Mat Arifin dan Pembantu Perpustakaan Norhasliza Md Salleh.

Mereka menjelaskan mengenai pengelolaan koleksi di Perpustakaan Negara Malaysia (PNM).

PNM terdiri dari dua blok yaitu Anjung Bestari dan Menara PNM yang didirikan seluas 5 hektar yang bersebelahan dengan wisma bernama dan Institut Jantung Negara. PNM juga menyediakan layanan perpustakaan anak-anak yang memiliki design interior menarik. PNM menyediakan berbagai fasilitas antara lain auditorium, ruang baca, ruang audiovisual. Ruang serbaguna, kantin, mushola dan parkir kendaraan. PNM menyediakan koleksi perpustakaan yang bisa dipinjam oleh pembaca.

Koleksi terdiri dari buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan bahan elektronik terbitan Malaysia dan luar negeri. Koleksi perpustakaan

meliputi bidang Karya Am, Falsafah dan Fahaman yang berkaitan, Agama, Sains Kemasyarakatan, Bahasa, Sains Tulen, Sains Gunaan, Kesusasteraan, Geografi dan Sejarah Alam. Sama seperti dengan fungsi Perpustnas di Indonesia, PNM juga menjadi tempat yang mengeluarkan ISBN dan ISSN.

PNM mengkatalog, mendaftarkan, dan menyimpan rekod bahan bacaan di dalam pangkalan data. Dibawah Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 (Akta331) rekod bibliografi setiap bahan yang diterima akan diwujudkan dan diterbitkan. Manajemen automasi perpustakaan menggunakan Sistem Katalog Atass Talian (SKAT) atau katalog induk kebangsaan (KIK). Perpustakaan Negara Malaysia memiliki sumber digital. Sumber digital tersebut bisa diakses di www.pnmdigital.gov.my

Inspirasi



Suasana di dalam Perpustakaan Kota Kuala Lumpur

Perpustakaan Digital PNM terdiri dari lebih dari 2 juta judul *e-book*, 200 judul *e-majalah*, 2300 judul dari 98 buah negara dalam 55 bahasa (*e-surat kabar*), *e-jurnal*, dan koleksi digital PNM dan terbitan PNM. PNM juga memiliki portal *u-Pustaka* yang terdiri dari 8 perpustakaan di Malaysia, yaitu Perpustakaan Negara Malaysia, Perpustakaan Kuala Lumpur, PPA Selangor, Intan Kiara, PPA Negeri Sembilan, Pustaka Negeri Sarawak, PPA Pahang, Perpustakaan Negeri Sabah.



Dua pustakawan DJK (Ernawaty[kiri] dan Dina Andriani [kanan]) di Perpustakaan Negara Malaysia

Dengan adanya portal ini, pembaca dimungkinkan untuk lebih mudah mendapatkan informasi dari 8 perpustakaan ini. PNM memiliki layanan rujukan online yang dilengkapi 30 buah unit komputer yang disertai akses internet, ruang perpustakaan untuk anak-anak, ruang audio dan ruang audiovisual. PNM juga mendapatkan donasi dari Samsung berupa didirikannya ruang perpustakaan yang bernama Perpustakaan Bestari Samsung. Perpustakaan Bestari Samsung terdiri dari beberapa zona antara lain zona kanak-kanak, zona interaktif, zona kerja, zona pembaca dan layanan interaktif direktori.



Pustakawan PNM (paling kanan) berbincang-bincang dengan peserta study visit

Peran utama setiap Perpustakaan Nasional adalah menyimpan dan memperluas penggunaan koleksi terbitan dalam negaranya serta koleksi tentang negara yang diterbitkan di luar negeri. Sebagai Perpustakaan Nasional Malaysia, lembaga ini menjadi lembaga memori sejarah dan kebudayaan serta perpustakaan yang menyimpan, mendokumentasikan dan memelihara pencapaian intelektual yang telah diterjemahkan dalam bentuk cetak dan bukan dicetak. Koleksi *Malysiana* adalah koleksi warisan negara dan bangsa Malaysia.

Inspirasi

Peserta study visit berfoto bersama di depan Perpustakaan Negara Malaysia



Monograf berarti buku yang meliputi semua bidang hal seperti Karya Umum, Filsafat, Agama, Ilmu Sosial, Bahasa, Ilmu Jati, Teknologi, Sains Terapan, Seni, Sastra, Geografi dan Sejarah.

Koleksi Monograf Malaysiana ditempatkan di Lantai 2, Tengah dan Lantai 3 Timur yang terdiri dari bahan-bahan yang diterbitkan di dalam dan luar Malaysia secara keseluruhan atau sebagian besar isinya adalah tentang atau berhubungan dengan Malaysia dan penduduknya, tidak terbatas waktu penerbitan atau bahasa yang digunakan. Simbol yang digunakan untuk koleksi ini adalah M (Malysiana), MR (Malysiana Referensi), MB (Brosur Malysiana), f M (folio Malysiana) dan ff M (double folio Malysiana).

Koleksi Monograf Luar Negara merupakan terbitan seperti buku, direktori, kamus, ensiklopedia, buku manual, atlas, almanak, tesaurus dan bahan kit multimedia. Koleksi ini terdiri dari berbagai subjek hal umum dan ditempatkan di Lantai 3 Tengah, Anjung Bestari, Perpustakaan Negara Malaysia.



Atas: Seorang petugas menjelaskan fungsi ruang reservasi buku di PNM
Bawah: Perpustakaan anak-anak yang dikelola oleh PNM

Peran Perpustakaan dalam Repositori Institusi

oleh: Dina Andriani/Pustakawan Muda



Seminar Nasional bertajuk Peran Perpustakaan Dalam Pengelolaan Repositori Institusi diselenggarakan di Batam pada 20-22 Oktober 2015. Seminar ini digagas oleh Forum Perpustakaan Khusus Indonesia.

Perpustakaan yang ideal adalah perpustakaan yang mampu menjalankan fungsi pokoknya yang dilengkapi sarana prasarana dan sumber daya manusia yang memadai, serta sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan pengguna yang beragam. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangatlah cepat, hal ini telah menunjukkan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan manusia.

Perpustakaan khusus adalah salah satu perpustakaan yang menerapkan

teknologi informasi dalam memenuhi kebutuhan informasi. Salah satu informasi yang ada di perpustakaan adalah repositori digital atau koleksi lokal.

Repositori adalah mengumpulkan, mengelola, menyebarkan dan mengelola seluruh karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh institusi. Dari karya-karya tersebut akan difungsikan dan dikelola dalam bentuk digital serta dapat menjadi pendukung dalam proses pemenuhan informasi baik institusi dan masyarakat umum.

Paparan materi tersebut dijelaskan dalam Seminar Ilmiah Nasional Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI) di Batam (20-22 Oktober 2015). Pustakawan Ditjen Ketenagalistrikan - Ernawaty dan Dina Andriani - ditugaskan untuk menghadiri seminar tersebut.

Acara dibuka oleh Ketua Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (Ramatun Anggaraini, BPPT) dan Ketua panitia Seminar Ilmiah Nasional FPKI (Dewi Kaniyasi, BPK), yang dihadiri oleh 120 (seratus dua puluh) orang

Kolom



Seorang petugas sedang mengolah buku di Supporting Center National Library Board Singapore (NLB)

dari berbagai perpustakaan khusus kementerian/lembaga se-Indonesia. Pelaksanaan kegiatan diadakan di ruang Beijing Hotel Harmoni One, Jl. Engku Putri No. 1 Batam.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama yang berjudul "Konsep Pengembangan *Knowledge Management* melalui Kebijakan Teknologi, Pengembangan Konten Akses dan Preservasi" oleh Zainal A. Hasibuan. Menurutnya, pustakawan bertugas untuk mengelola informasi dan pengetahuan. Keamanan informasi bukan hanya perihal pencurian data saja, namun kita sebagai sebuah bangsa dicuri dan tidak ada lagi jati diri bangsa sehingga informasi yang beredar tidak terseleksi.

Dalam kemudahan akses repositori, Zainal memberi saran agar Perpustakaan RI dapat memberikan penghargaan kepada perpustakaan khusus terbaik dengan penilaian misalnya kemudahan akses, dan lain-lain.

Permasalahan dalam *knowledge management*, yang dominan adalah *tacit knowledge* (sumber yang berasal dari pikiran seseorang, ide baik dari

individu maupun kelompok). Ini didokumentasikan dalam *e-resources*, publikasi, dokumen dan lainnya. Untuk mengembangkan *knowledge management* kita harus perhatikan pengguna; antarmuka; aplikasi; intergrasi; layanan; dan infrastruktur.

Materi kedua berjudul "Peran Perpustakaan dalam Komunikasi Ilmiah dan sebagai *Stakeholder Open Access Repository*" oleh Ida F. Priyanto. Ida menyampaikan, Komunikasi

Ilmiah (*scholarly communication*) perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Ia melanjutkan, pustakawan perlu berbicara di luar perpustakaan, diskusi dengan peneliti agar dapat masukan ide-ide segar. Komunikasi ilmiah sayangnya banyak dikelola oleh *publisher* atau penerbit, jika pemakai banyak harga akan naik. Komunikasi dengan penerbit sangat penting untuk melihat perkembangan database.

Ida menambahkan, Deklarasi di Budapest (2002-2003) menyatakan bahwa akses informasi akan sangat baik jika bebas/ boleh mendownload, mendistribusi, dan mengupload. Jurnal online sudah ada sejak tahun 1990 (sejak internet ada). *Open access journal* yang terdaftar dalam *directory* yaitu: Garuda repository, Research repository, Instutisional repository dan Subjek repository.

Ia menyatakan yang kita punya adalah insitusal repositori namun kita tidak punya direktori. Manfaat dengan adanya *open access* yaitu visibilitas meningkat, global, aksesibilitas, kolaborasi, altmetrics. Peran repository yaitu sebagai platform mengakuisisi dan



Peserta berfoto bersama di halaman depan NLB

Kolom

kebijakan untuk menyimpan semua *research* ke repository.

Materi ketiga berjudul “*Intelligent Data Repository Management in Digital Libraries*” oleh Kudang Boro Seminar. Ia menyampaikan repository juga berfungsi mengaitkan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sehingga menjadikan pustakawan yang menguasai atas informasi yang berjalan. Ia menegaskan repository harus melihat perkembangan zaman dan mampu melihat tren riset.

yang menggunakan *slim-senayan*. Tujuan repository LIPI adalah untuk memperlihatkan nilai ilmiah sosial dan finansial dari LIPI, memaksimalkan keterlihatan dan aksesibilitas karya ilmiah LIPI, dan melestarikan karya ilmiah LIPI.

Henriyadi dari Pustaka Bogor menjelaskan mengenai pengertian repository, Profil Balitbang Pertanian, SDM Balitbangtan yang berkaitan dengan *output*, Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan sebagainya untuk publikasi hasil

diakomodasi, interoperabilitas dengan sistem yang dikembangkan oleh pihak lain, dan infrastruktur kualitas internet. Irwan Rawal Husdi dari BPPT menerangkan sejarah munculnya Instusional Repository dimulai dari adanya OAI yang berkembang di era tahun 1990-an dan dari sini lahir konsep dan praktik simpanan kelembagaan untuk hasil karya intelektual institusi.

Adanya *search engine* Google dan Wikipedia memudahkan semua orang untuk dapat mengakses informasi yang dibutuhkan tapi apakah bisa didapat informasi yang dibutuhkan apabila hasilnya yang lebih banyak adalah facebook, twitter dan Linked In sehingga dibutuhkan repository lembaga. Tujuan Instusional Repository ini adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan mendiseminasikan hasil perekayasaan teknologi BPPT. Peraturan Ka BPPT No. 116 Tahun 2013 merupakan aturan legal dari pelaksanaan Instusional Repository ini.

Abdulhamid Dipopramono dari Komisi Informasi Pusat menjelaskan peran repository konten lokal dalam Mendukung Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengawali paparannya, ia menyatakan peradaban dunia berubah dari zaman batu, era masyarakat bercocok tanam, masyarakat industri, hingga kini memasuki era masyarakat informasi. Transformasi sosial ekonomi budaya politik pun berubah menjadi lebih elektronik. Kita hidup di tengah masyarakat jaringan, dimana kata-kata, gambar, foto, bahkan video dipertukarkan tiap detik dan kekuatan komunikasi makin besar.

Dengan teknologi, orang ingin keterbukaan, partisipasi, dialog,



Pustakawan NLB Singapura tengah menjelaskan mengenai proses pengadaan buku di NLB mulai dari pembelian buku, pengolahan buku sampai buku siap untuk disusun di rak

Acara selanjutnya adalah Diskusi Panel Pengelolaan Repository Perpustakaan. Dalam pemaparan ini ketiga lembaga perpustakaan tersebut menjabarkan pengelolaan dan pengalaman kegiatan repository di masing-masing perpustakaan.

Sri Hartinah dari LIPI menjelaskan bahwa semua sistem di LIPI sudah link dalam satu URL seperti tata persuratan, SKP, dan link untuk peneliti di LIPI yaitu <http://peneliti.lipi.go.id>. Software yang digunakan: Eprints dan juga ada

penelitian. Ia mengatakan ada potensi sumber informasi yang sangat besar melalui diseminasi dan repository. Harapan ke depan, migrasi ke repository publikasi Balitbangtan sebagai suatu sistem dalam satu website dan bisa mendapatkan informasi dari satu sumber.

Ia juga menyampaikan permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai keamanan sistem dan keberlanjutan pengembangan sistem, perkembangan kebutuhan pengguna yang harus



Seorang petugas tengah melakukan proses labelling buku di Supporting Center NLB

komunitas, terhubung dan *real time*. Kesesuaian prinsip UU KIP dengan *Good Government* (sejalan dengan prinsip KIP) adalah partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan publik, efektivitas dan efisiensi, dan profesionalisme.

Peran repositori dalam mendukung UU KIP dapat diketahui bahwa repositori konten lokal sangat mendukung UU Keterbukaan Informasi Publik karena:

1. Membuka akses kepada publik untuk mendapatkan informasi;
2. Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang dikelolanya;
3. Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
4. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
5. Memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam UU KIP tentang kewajiban badan publik, bahkan jauh lebih mendalam dari ketentuan yang ada, yaitu terkait hal-hal khusus (konten lokal) yang dikelola oleh perpustakaan khusus yang sudah mendalam. Ini sesuai juga dengan tujuan UU KIP, yang tercantum dalam Pasal 3.

Peserta diberikan kesempatan untuk berkunjung ke *National Library Board* (NLB) of Singapore pada hari terakhir seminar. Peserta mengunjungi Supply Center NLB. Di tempat ini, peserta seminar dijelaskan proses pengadaan buku mulai dari pembelian buku, pengolahan buku sampai buku siap untuk disusun di rak. Semua proses yang dilakukan sudah terkomputerisasi sehingga *human error* bisa diminimalisir.

SATU TAHUN

Capaian Kementerian ESDM

Subsektor Ketenagalistrikan

KETENAGALISTRIKAN

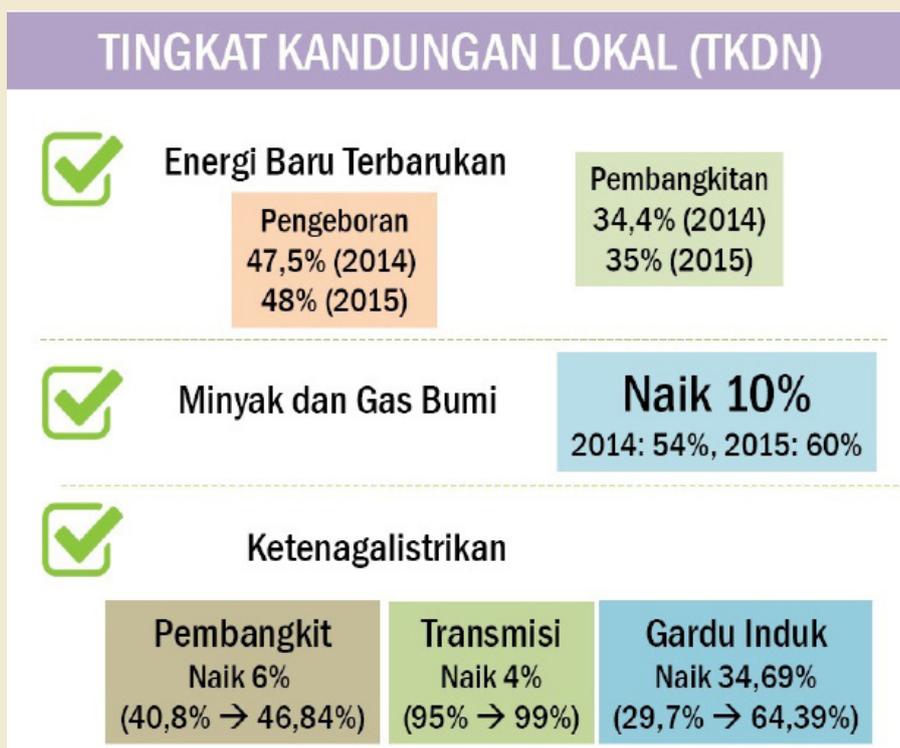
✓ Rasio Elektrifikasi	Target 2015 87,4%	Realisasi Aug 2015 86,7%	Outlook 2015 88%
✓ Kapasitas Terpasang Pembangkit	53.533_{MW}	Tambahkan pembangkit hingga akhir 2015 3.977_{MW}	
✓ Target pembangunan transmisi 2015	4.717_{kms}	Transmisi telah selesai 2015 922_{kms}	
✓ Subsidi Listrik	Target 2015 66,15 T	Realisasi Aug 2015 38,43 T	Outlook 2015 66 T
✓ Energy mix pembangkit	Target 2015 8,85%	Realisasi Aug 2015 8,87%	Outlook 2015 8,85%
✓ Program 35.000 MW (dan 7.400 MW)	Beroperasi (bagian dari 7.400 MW) 1.491_{MW}	Finansial close dan konstruksi 4.573_{MW}	Perencanaan 1.764_{MW}
		Pengadaan 29.192_{MW}	

INVESTASI

✓ Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Agu' 15: 1,2 Miliar USD Target: 4,5 Miliar USD
✓ Minyak dan Gas Bumi	Agu' 15: 9,6 Miliar USD Target: 23,7 Miliar USD
✓ Ketenagalistrikan	Agu' 15: 6,8 Miliar USD Target: 11,2 Miliar USD
✓ Mineral dan Batubara	Agu' 15: 3,3 Miliar USD Target: 6,1 Miliar USD

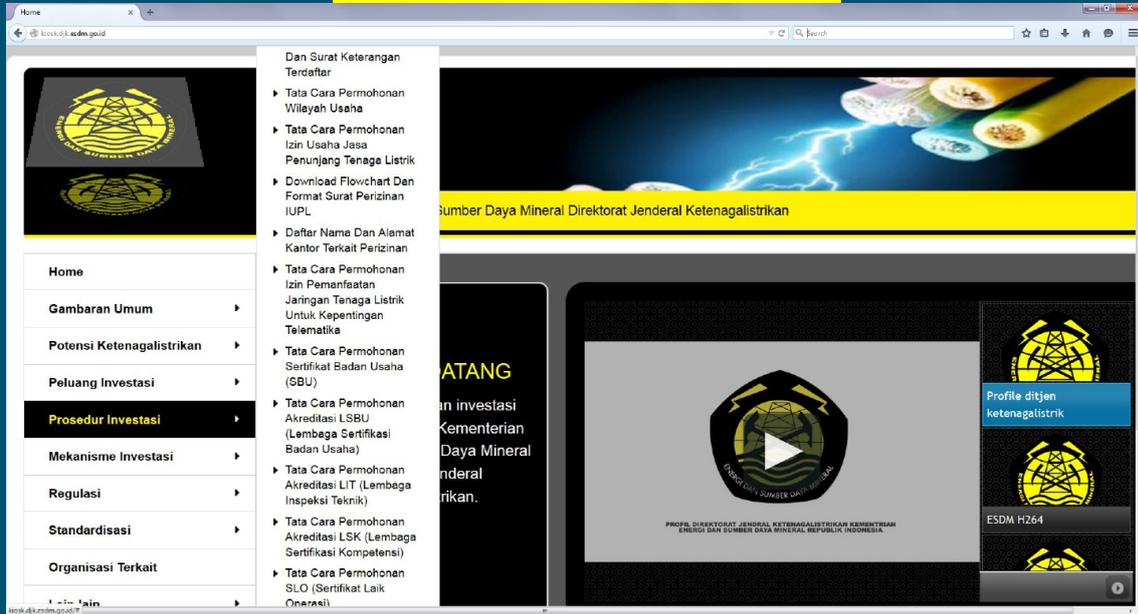
Target 2015
45,5 miliar USD

Realisasi Agu' 15
20,9 miliar USD



Informasi terkait Perizinan Ketenagalistrikan dapat diakses di:

kiosk.djk.esdm.go.id



Ingin tahu tata cara investasi
ketenagalistrikan???

Konsultasi secara langsung



Ruang Pelayanan Informasi
Jl. H.R. Rasuna Said
Blok X 2 Kav. 7 - 8
Jakarta Selatan
12950, Indonesia
Telp. (021) 5225180
ext. 1123

Hubungi kami melalui email di:
info@djk.esdm.go.id

Kunjungi website kami di:
www.djk.esdm.go.id